Jakarta, 26 Mei 2016

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Utara No. 9–13

Jakarta Pusat

Melalui;

**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

**CQ KETUA MAJELIS HAKIM PERSIDANGAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) No. 05/PID/PK/2016/PN.JKT.PST**

Jalan Bungur Besar Raya 22-26

Jakarta Pusat

Perihal : Kesimpulan Persidangan Peninjauan Kembali

Terhadap Putusan Pra Peradilan No. 01/Pid-Prap/2016/PN.Jkt.Pst

Putusan Mengandung Penyelundupan Hukum

“**Perkara Tidak Cukup Bukti Karena Merusak Barang Milik Sendiri Dan**

**Untuk Menyelamatkan Diri**”

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini**,** sebagai berikut:

1. Nama : Johannis Vityn

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Graha Cempaka Mas E2/23/01, Jalan Letjend Soeprapto Kav 3

Jakarta Pusat

HP : 082111222677

Email : [j\_vityn@yahoo.com](mailto:j_vityn@yahoo.com)

2. Nama : Liauw Fie Boen

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Graha Cempaka Mas A2/20/09 Jalan Letjend Soeprapto Kav 3

Jakarta Pusat

HP : 0816834746

Email : [aboen168@gmail.com](mailto:aboen168@gmail.com)

3. Nama : Justiani

Pekerjaan : Dosen

Jabatan : Ketua IV Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka

Mas (PPRSC GCM)

HP : 081218135758

Email : [liemsioklan@gmail.com](mailto:liemsioklan@gmail.com)

Nama : Hendra Andreas

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan : Wakil I Sekretaris Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha

Cempaka Mas (PPRSC GCM)

HP : 081215459695

E mail : [hendraby@yahoo.co.id](mailto:hendraby@yahoo.co.id)

Kedudukan keduanya sah dan berdasar hukum mewakili PPRSC GCM beralamat di Rukan A-10 Graha Cempaka Mas (GCM) Jln. Letjen Soeprapto Kav 3 Jakarta Pusat. Tlp 021-4215939 Email: [pprsc.gcm@gmail.com](mailto:pprsc.gcm@gmail.com)

4. Nama : Tuan Haji Boyamin Saiman

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

(MAKI)

Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, RT. 02 RW. 04,

Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

HP : 08122611739

Email : boyamin\_maki@yahoo.com

Kedudukannya sah dan berdasar hukum mewakili Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kontak Person : 08122611739.

1. **DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)**
2. Bahwa, Permohonan Peninjauan Kembali PARA PEMOHON PK diajukan terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Februari 2016**. Putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*),

Dengan demikian permohonan peninjauan kembali oleh PARA PEMOHON PK telah berdasarkan pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP Jo Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004. *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjuan kembali kepada Mahkamah Agung”.* Selanjutnya hal-hal yang menjadi alasan Peninjauan Kembali diatur dalam Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

1. *Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dengan kuat, bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berubah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*
2. *Apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
3. ***Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.***
4. Bahwa Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2014 mengizinkan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) untuk Gugatan Pra Peradilan.
5. Bahwa, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh PEMOHON PK dalam kedudukannya selaku PEMOHON, sebagai bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*, oleh karenanya PEMOHON PK memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Aquo, sebagaimana berdasarkan pada ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP;
6. Bahwa, **berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggerang, 8 s/d 12 Maret 2012 Nomor Urut 8** tentang permasalahan banyak diantara terpidana yang tidak menggunakan upaya hukum banding atau kasasi tetapi langsung mengajukan permohonan PK dengan alasan bahwa Putusan Judex Factie **DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA** (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP) dengan solusi UU telah memberikan jalan/hak kepada Terpidana untuk melakukan upaya hukum PK atas Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

1. Bahwa, PEMOHON PK mengajukan permohonan aquo kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pengadilan yang memutus Perkara Aquo, sehingga permohonan Peninjauan Kembali oleh PEMOHON PK telah memenuhi syarat formilnya suatu Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 264 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) KUHAP ;
2. Bahwa, berdasarkan uraian angka 1-5 diatas, maka permohonan peninjauan kembali oleh PARA PEMOHON PK telah sesuai dan berdasarkan pada alasan hukum yang tepat, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263, 264 KUHAP serta ketentuan Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

**B. KETERANGAN SAKSI FAKTA & SAKSI AHLI**

1. **KETERANGAN SAKSI FAKTA**
2. **JEMMY ROBERTY WOLLAH**

Saya sebagai Sekretaris Umum PPRSC GCM (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas) dimana PPRSC GCM saat itu ditugasi mengambil alih Asset milik bersama (Bagian Bersama milik Warga) sebagaimana ketentuan UU 20/2011 dan musyawarah warga dengan mediasi dipimpin oleh Kapolsek.

Kronologis kejadian tanggal 1 Juni 2015 di Tower C1 Lantai 5 Ruang Asset milik Bersama (warga GCM) yang disiapkan untuk Olahraga bersama, kumpul-kumpul, arisan, makan-makan, lokasinya di sampingnya ada kolam renang, sesuai dengan Hasil Keputusan Musyawarah warga dalam RULB maupun RUTA bahwasanya di Kawasan GCM wajib ditegakkan UU 20/2011 Rusun, dimana saya sebagai Pengurus PPRSC GCM dari awal memang terlibat dalam proses mediasi bersama Kapolsek Kemayoran Kompol Suyud dan pasukannya dari sore membantu MEDIASI untuk ambil alih Bagian Bersama milik warga di Lantai 5 Tower C1 yang dipakai sebagai Ruang PPRS milik warga namun masih diduduki oleh pihak yang mengaku pengacara PT Duta Pertiwi Tbk bernama Hokli Lingga yang tidak mau pergi dari tempat itu.

Hokli Lingga bahkan malah mengerahkan satpam dan preman untuk menduduki ruangan-ruangan fasum fasos milik warga tersebut, artinya semua proses dari siang sampai kejadian chaos itu ada Kapolsek dan pasukannya (Anggota Polri) di tempat tersebut, bahkan Kapolsek sendiri yang memimpin mediasi untuk mengusir Hokli Lingga yang menduduki ruangan PPRS milik warga. Ybs tidak mau pergi sampai menjelang malam. Namun yang mencurigakan adalah sejak awal mediasi sudah tampak terlihat wajah-wajah satpam dan preman yang sebagian besar tidak dikenal oleh warga, artinya bukan Satpam organik yang biasa melayani warga GCM.

Secara organisasi, Kejadian di GCM tanggal 1 Juni 2015 itu apakah pidana 170 atau tidak seharusnya dilihat dari 3 hal, yakni motifnya, kaitan dengan kepemilikan kaca yang dipecah dan analisa peristiwa (detil kejadiannya), status kepemilikan barang yang dipecah itu.

**Pertama**. Dalam kasus GCM tanggal 1 Juni 2015 Motif pemecahan kaca adalah untuk penyelamatan nyawa manusia atau alasan kemanusiaan, yang pasti dilakukan oleh siapapun manusia yang memiliki rasa perikemanusiaan, hal mana lebih tepat dengan Pasal 49 KUHP yaitu terpaksa untuk membela diri.

**Kedua.** Sedang menilik detil urutan kejadiannya atau analisa peristiwanya ada dua kejadian yang hampir bersamaan, jadi ada kejadian lain yang mendahului atau hampir bersamaan, jadi tidak berdiri sendiri sengaja merusak barang itu, maka itu tidak bisa disebut sebagai secara bersama-sama, apalagi berencana bersama-sama, apalagi pengeroyokan bersama-sama, karena:

1. Kejadian pertama adalah adanya sejumlah banyak orang (warga) secara bersama-sama melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Kapolsek Kemayoran dan dikawal oleh sejumlah anggota dari mulai awal kejadian sehingga dipastikan adanya rasa aman karena keberadaan Kapolsek dan pasukannya.
2. Dan kejadian kedua adalah setelah terjadi chaos karena penyemprotan asap APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang dilakukan oleh orang-orang bayaran PT. Duta Pertiwi yaitu ada kejadian pemecahan kaca di ruang kecil berukuran 2x3 m2 yang dilakukan oleh Johannis Vityn seorang diri, artinya tidak bersama sama orang lain, dan itupun karena adanya asap tebal dan kesulitan bernafas dan ada orang yang hampir pingsan. Artinya itu bukan rencana jahat tetapi reflex spontanitas atas motif penyelamatan diri dan rasa kemanusiaan, karena juga untuk memecah kaca sekecil itu tidak diperlukan sebuah rencana pengeroyokan apalagi secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP.

**Ketiga**. Tentang Kepemilikan Bersama Lokasi TKP yang kacanya dipecah. UU 20/2011 pasal 74 ayat (1) kepemilikan sarusun ayat (2) kepemilikan lahan bersama, bagian bersama dimana TKP berada. UU 20/2011 Pasal 75 dan 76 aset milik bersama diwakili oleh pengurus P3SRS dan untuk bertindak hukum adalah pengurus P3SRS bukan hak Badan Pengelola, karena kewenangan badan pengelola hanya urusan satpam, cleaning service dan teknisi gedung, administrasi layanan penghuni saja.

Tentang Sertifikat belum dibaliknamakan. Tempat TKP adalah Bagian Bersama yang berdasarkan Pasal 1 butir 13 UU Nomer: 20 Tahun 2011 Tentang Rusun, semestinya tidak boleh disertipikatkan. Tapi terlanjur disertipikatkan a.n. PT. Duta Pertiwi. Dan itupun diketahui oleh warga belakangan yaitu sekitar medio Juni 2015. Dan karenanya PPRSC GCM juga segera mengirim surat kepada BPN untuk membalik namakan 27 SHM SRS atau membatalkan nya. Karena awalnya, pada saat pembangunan memang semua sertifikat atasnama pengembang, namun UU 20/2011 Pasal 75 ayat (2) juncto Pasal 59 mengatur bahwa 1 tahun sejak unit pertama terjual harus dibentuk lembaga badan hukum P3SRS dan sesaat setelahnya Pertelaan yang sudah didaftarkan dengan SK Gubernur wajib diserahterimakan dari Pengembang kepada warga pemilik atasnama P3SRS, maka bagian bersama wajib dibaliknamakan ke Badan Hukum PPRS, tidak boleh lagi atas nama Pengembang, atau sekalian dibatalkan, artinya SHM atas nama Pengembang (PT. Duta Pertiwi) adalah ILEGAL.

Warga GCM sudah mempunyai 3 bukti kepemilikan bersama yaitu: 1. AJB dan SHM Sarusun yang tercantum jual beli meliputi lahan bersama, bagian bersama, benda bersama. 2. SK Gubernur 1204/1997 tentang Pertelaan Kawasan Hunian dan Non Hunian Graha Cempaka Mas. 3. Dokumen Serah Terima dari Ex pengembang (PT Duta Pertiwi Tbk) kepada Warga atasnama PPRSC GCM. Bahwasanya Ruang P3SRS milik bersama warga di Lantai 5 Tower C1 yang faktanya masih atasnama PT Duta Pertiwi Tbk yaitu SHM 175/V/C Kelurahan Sumurbatu itu adalah bukti Pengembang yang tidak punya ikhtikad baik karena Pertelaan sudah ada SK Gubernur dan serah terima sudah dilakukan seharusnya diikuti dengan baliknama. Kalau tidak, itu masuk dalam penipuan dan penggelapan hak.

Serah terima pengelolaan ruang bersama milik bersama pengembang wajib ikuti UU 20/2011 Pasal 75 wajib serah terima. Karena pada saat PPJB dan AJB warga pemilik (pembeli sarusun) sudah membayar pajak jual beli (BPHTB), lalu setiap tahun pemilik sarusun juga membayar PBB (Pajak Bumi & Bangungan) atas bangunan bersama dan bumi bersama Rusun GCM. Di dalam PBB SARUSUN juga tercantum 3 macam komponen yaitu pajak bangunan, pajak bumi bersama, dan pajak bangunan bersama. Pengembang memiliki KEWAJIBAN untuk menyerahterimakan lahan bersama, bagain bersama, benda bersama selambat-lambatnya 1 tahun setelah unit pertama terjual. Yang dimaksud serah terima juga wajib termasuk membaliknamakan SHGB dan SHM untuk lahan bersama dan bagian bersama kepada warga atasnama wali amanah yaitu P3SRS.

Atas pertanyaan siapa yang paling berhak dan paling bertanggungjawab atas Fakta bahwa Sertifikat masih atasnama PT Duta Pertiwi Tbk. Agar tidak memperkeruh persoalan maka semua pihak wajib ikut menata memperbaiki praktek TUN yang salah di masa lalu, misalnya Polisi juga jangan lantas serta-merta menjadikan barang bukti (yang masih “disputable”) sebagai rujukan kebenaran untuk dasar penetapan TERSANGKA. Pihak pemerintah juga perlu menetapkan Sanksi nya apa apabila pengembang tidak membaliknama ya perlu pencabutan izin usaha. Warga Pemilik perlu melakukan langkah-langkah penyelesaian baik di jalur hukum maupun non hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh PPRSC GCM dengan mengirim surat ke Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN serta mendaftarkan permohonan PTUN.

Ada yang penting untuk Yang Mulia ketahui adalah bahwa Ruang PPRS yang kacanya dipecah oleh Sdr. Johannis Vityn itu adalah merupakan bagian bersama milik warga. Bukan milik PT Duta Pertiwi Tbk. Tentang kepemilikan Sarusun sudah ada UU 16/1985 Pasal 8 yang diperbaharui dengan UU No. 20/2011 diatur dalam Pasal. 46, keduanya mengenal 2 macam hak, yaitu:

* Hak Kepemilikan Perorangan, berupa SHM Sarusun (Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun) yaitu kepemilikan atas Ruangan yang menjadi Rumah tempat tinggal masing - masing yang dibatasi Tembok Dinding, Jendela,Teras Luar dan Pintu.
* Hak Kepemilikan Bersama, yaitu Hak atas Asset milik bersama yang terdiri dari Tanah Bersama, Bagian Bersama, dan Benda Bersama. Atas Hak kepemilikan bersama ini, besarnya diatur dengan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional) yang tertera dalam SHM SRS masing-masing.

Sebab, 5 Februari 2015 Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk habis masa jabatan, sebagaimana bunyi Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon Nomer 01 Tahun 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Tahunan Anggota PPRSC GCM, lalu PT Duta Pertiwi Tbk merekayasa Surat Kadisperum DKI No. 492/-1.796.55. pada 11 Februari 2015. Disitu kewenagan Kadisperum DKI juga berbeda kapasitasnya. Dalam hal GCM adalah bukan Rusun milik Pemda sehingga Kadisperum DKI tidak punya Kewenangan untuk mengatur Pengelolaan Rusun GCM, namun yang bersangkutan memaksakan diri soal pengelolaan Rusun dalam hal ini melalui Surat Kadisperum No. 492 menunjuk PT Duta Pertiwi Tbk sebagai Pengelola kawasan GCM dan memaksa warga membayar hanya kepada PT Duta Pertiwi Tbk. Selain melanggar HAM dan melanggar UU Rusun, juga adalah aneh tapi nyata seorang Kepala Dinas Perum DKI yang baru dilantik (Ika Lestari Aji) langsung tidak mengakui hasil pekerjaan Kepala Dinas Perumahan & Gedung DKI sebelumnya (Ir. Yonathan Pasudung) yang justru menegakkan UU. Sehingga PPRSC GCM warga hasil RULB 20 September 2013 yang difasilitasi oleh Kadisperum & Gedung DKI berlandaskan Kesepakatan Tripartit TIDAK DIAKUI oleh Ika Lestari Aji, dan lalu Surat 492 yang cacat hukum tersebut dijadikan dasar oleh Polisi menjadikan 2 warga Rusun GCM sebagai TERSANGKA.

Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua DPR RI tanggal 17 dan 25 Februari 2014 telah menghasilkan kesepakatan diantaranya dengan Kapolri agar stop kriminalisasi warga rusun oleh aparat Polisi yang ditukangi oleh Pengembang Nakal. Disamping juga menghasilkan keputusan dari Gubernur Joko Widodo (sehari sebelum cuti nyapres), menunjuk Percontohan Kawasan Rusun ada tiga (3) yaitu Graha Cempaka Mas, ITC Manggadua, ITC Roxy Mas dikeluarkan SK Gubernur DKI No. 1778 tanggal 6 November 2014, yang intinya P3SRS wajib penerapan MANAJEMEN RUSUN ONLINE (MARUSON) yang bisa diakses oleh semua pemilik unit sehingga amanah UU 20/2011 tentang P3SRS Nirlaba bisa diwujudkan. PPRSC GCM juga telah menerapkan aplikasi MARUSON.

Karena ini janji Presiden Joko Widodo kepada warga rusun, ketika kejadian 8 Januari 2016 pemenang tender PPRSC GCM yaitu badan pengelola baru akan mulai bekerja, PT Duta Pertiwi Tbk kembali mengerahkan ratusan FBR (Front Betawi Rembug) dan lalu malam harinya ratusan Polisi justru mengusir ratusan warga yang berada di basement GCM yang notabene adalah milik warga GCM sendiri, hanya untuk kepentingan PT Duta Pertiwi Tbk. Pelanggaran HAM oleh Ratusan Polisi yang menangkap 10 warga GCM dan 20 Satpam (pemenang tender) dilaporkan lewat SMS kepada Presiden Joko Widodo, maka tanggal 10 Januari 2016 subuh Kapolri menugasi Kapolda Metro yang lalu mengutus Dir Intel Polda Metro untuk mendatangi warga yang masih ditahan di Mapolres Jakpus untuk meminta maaf lalu esoknya Wakapolda menerima sejumlah perwakilan warga GCM untuk gelar perkara dihadiri oleh Kapolsek Kemayoran, Wakapolres Jakpus, Irwasda, Dir Hukum, Dir Intel dipimpin langsung oleh Wakapolda Metro.

1. **YULIANTI**

Saya dan sekitar 7 orang terjebak didalam ruang PPRS, yang berukuran kira-kira dua kali tiga meter persegi, itu terjadi ketika Satpam PT Duta Pertiwi Tbk mulai beringas menyemprotkan APAR sehingga koridor penuh asap demikian juga ruangan kecil tersebut. Sebetulnya saya sendiri yang akan memecah kaca itu, apapun resikonya, karena kami sulit bernafas dan yang terfikir oleh saya saat itu adalah bagaimana menyelamatkan diri apalagi saya mendengar teriakan seorang wanita yang meminta-minta tolong sambil menangis, namun saya tidak menemukan alat apa yang dipakai untuk memecah kaca tersebut. Bapak Johannis Vityn refkleksnya levih cepat dari saya, dia yang langsung mengambil kursi dan pecahkan kaca.

Bahwa membongkar kaca adalah keterpaksaan dan harus dilaksanakan sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan sejumlah nyawa yang terjebak asap sehingga mengalami kesulitan bernafas dan mata perih bahkan seorang perempuan berteriak-teriak minta tolong dengan kondisi mau pingsan, justru karena penyebab kerusuhan tersebut adalah perbuatan Hokli Lingga dan Pelapor sendiri yang mengerahkan sejumlah preman dan satpam, yang mana satpamnya beringas kepada majikan (kami-kami ini pemilik seharusnya secara organisasi adalah majikan), malah Pelapor dengan satpamnya terbukti menyiapkan puluhan APAR di depan dan didalam ruangan Pengelola, yang ternyata sengaja dibikin untuk chaos kan suasna, sehingga dampaknya sangat mengganggu kepentingan orang banyak, ketentraman, kenyamanan, keselamatan, bahkan untuk sebagian keluarga juga mengganggu kesehatan mereka,

Kondisi saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya merasa mau pingsan karena sulit bernafas dan mata perih. Kalau gak ada Pak Johannis saya sudah tidak tahu sudah kayak bagaimana kejadiannya. Saya teriak-teriak minta tolong. Untung ada Pak Johannis yang membantu memecahkan kaca sehingga saya bisa selamat. Seharusnya Pak Johannis menjadi pahlawan, setidaknya buat diri saya, bukan menjadi tersangka. Saya sudah dipanggil sebagai SAKSI dan saya hadir di Polres Jakarta Pusat memenuhi panggilan tersebut. Namun ketika saya sudah sampai di Polres ternyata Penyidiknya sakit. Jadi saya kirim pesan SMS dan juga titip ke Penyidik di ruangan bahwa kalau penyidik sudah sembuh dan siap menyidik saya, maka saya siap dijadual kembali. Namun sampai detik ini belum ada kabar lagi.

Kami rumah tangga tinggal disitu. Anak isteri. Bapak Ibu, Orang tua, Bayi, dll. Ingin hidup damai, tentram, nyaman, namun selalu saja PT Duta Pertiwi Tbk menghalangi hak-hak azasi warga tersebut demi memaksakan kehendak dengan segala cara untuk meraup keuntungan bahkan tidak segan-segan dengan menukangi segala macam aparat yang diperlukan

1. **IRAWAN RAHARJO**

Saya jadi korban juga. Saya disemprot APAR oleh para satpam dari arah ruangan kantor PT Duta Pertiwi Tbk. Saat itu di koridor banyak warga, saya ada di koridor depan lift itu. Di depan ada 3 ruangan. Ruangan PPRS. Ruang Pengelola dan Ruang Resepsionis. Ruangan ruangan itu berisi penuh dengan satpam yang berjaga-jaga. Padahal biasanya kosong hanya beberapa pegawai dan waktu itu pegawai sudah tidak berani. Ada puluhan Satpam ada didalam ruangan ruangan itu. Saya melihat dengan jelas karena jarak saya berada dengan ruang-ruangan itu hanya sekitar 2 sampai 3 meter saja seperti dari sini ke tempat pak Hakim. Ada juga saya lihat puluhan APAR disiapkan oleh Satpam. Saya tanyakan untuk apa itu APAR namun mereka tidak menjawab. Saya juga tidak terfikir atau curiga mengapa banyak satpam sembunyi di ruangan ruangan itu. Untuk apa. Setelah kejadian baru saya mengerti bahwa itu sudah menjadi rencana jahat untuk membuat kekacauan dan kekisruhan, yang ternyata mengkambing hitamkan warga. Ketika Hokli Lingga dibawa keluar itu satpam-satpam itu semprot saya dan warga lainnya di koridor sehingga saya tidak bisa nafas, saya membayangkan apalagi yang didalam ruangan kecil itu. Saya saja di koridor sudah sulit bernafas. Saya heran mengapa Kapolsek dan pasukannya membiarkan semua kejadian itu, mengapa tidak menangkap satpam dan preman yang bikin kacau keadaan, kalau warga tidak ada yang ingin keadaan kacau di rumah sendiri, kami maunya damai dan tentram, namun selalu saja dibuat kejadian-kejadian yang membuat hidup kami susah dan tidak nyaman. Lebih aneh lagi, buat saya pahami kok justru warga yang menyelamatkan nyawa teman2 dan satpam yang terjebak di ruangan kecil itu dijadikan Tersangka. Saya jadi mengkaitkan mengapa dari siang sejumlah satpam dan preman sudah berada di tiga ruangan tersebut, itu hal yang tidak lazim, apakah ini semua adanya rencana busuk itu yang disengaja antara Hokli Lingga dengan Polisi, prasangka buruk saya entah terbukti atau tidak, namun yang jelas tanggal 4 Juni 2015 ketika Police Line dilepas oleh Kapolsek justru dikembalikan lagi ke Pihak PT Duta Pertiwi Tbk padahal sudah jelas niat awal Kapolsek melakukan mediasi adalah untuk kepentingan menegakkan amanah warga GCM mau menegakkan UU 20/2011, sudah jelas itu fasum fasos milik bersama warga, mengapa justru diserahkan kembali ke pihak PT Duta Pertiwi Tbk. Untuk apa Kapolsek bersedia melakukan mediasi? Ataukah ada perintah dari Kapolres sehingga kesimpulan berbelok. Ini semua warga masih tanda tanya sampai sekarang, yang menjadi jelas adalah fakta bahwa warga langsung dijadikan TERSANGKA.

Ketika Hokli Lingga berhasil diajak keluar maka Satpam dan Preman PT Duta Pertiwi Tbk mulai beringas, pada teriak-teriak dan Kursi di koridor diambil oleh Satpam lalu satpam tsb melempar kursi dan lalu membanting kursi dan ada yang melempar kursi ke arah warga. Sebagian lagi menyemprotkan APAR ke arah warga sehingga suasana pekat gelap penuh asap dan suasana menjadi kacau dan terjadi kepanikan dimana orang-orang pada lari mau menyelamatkan diri. Orang-orang mulai lari untuk menyelamatkan diri. Ada yang terjebak di dalam ruangan PPRS. Ada dua orang Satpam yang tadinya berada di koridor juga lari masuk ke ruangan PPRS dengan menutup hidung, disitu Sdr. Johannis Vityn justru membukakan pintu untuk kedua satpam yang terbatuk-batuk. Namun ternyata, asap makin menggila dan akhirnya masuk memenuhi ruangan PPRS. Disitulah mulai panik didalam ruangan. Sdr. Johannis Vityn cepat tanggap untuk mencari jalan keluar lain, karena dari arah pintu koridor sudah gelap dengan asap, dengan memcahkan kaca pakai kursi yang ada. Kejadian itu saya dengar dari cerita Sdr. Johannis dan Sdri. Yulianti serta Sdr. Mustad dan Sdr. Aboen malam hari setelah kejadian.

Pemahaman Polisi yang keliru. Tidak paham soal Organisasi P3SRS yang sudah diatur dalam UU20/2011, maka PT Duta Pertiwi Tbk yang mengabaikan amanah UU. Tidak mau mendengarkan warga sebagai wali amanah. Sebagai Penegak Hukum, Polisi justru terbalik hanya mendengarkan dan merujuk produk-produk PT Duta Pertiwi Tbk yang melanggar UU tersebut. Seharusnya Polisi mendengar dari semua pihak agar tidak menjadi alat kepentingan PT. Duta Pertiwi.

Dalam AJB dan Akte Jual Beli (AJB) setiap warga juga meliputi kepemilikan lahan bersama, bagian bersama, benda bersama yang tercantum secara rinci dalam SK Gub Pertelaan No.1204/1997 dan juga dokumen Serah terima dari pengembang kepada PPRSC sebagai wali amanah warga. Bahwasanya PT Duta Pertiwi Tbk mengabaikan hal tersebut, itu artinya pelanggaran terhadap UU atau Kejahatan. Pemahaman Polisi terlalu dangkal dan tidak menjangkau UU beserta perangkat hukumnya sebagaimana disebut diatas, bagaimana mungkin perbuatan melawan hukum (kejahatan) dijadikan sebagai rujukan untuk menjadikan orang sebagai TERSANGKA.

1. **KETERANGAN SAKSI AHLI PIDANA: HERY FIRMANSYAH, SH., M.HUM., MPA. DOSEN UNIVERSITAS TARUMANEGARA. JALAN LETJEND S. PARMAN NO. 1, GROGOL JAKARTA BARAT.**

* Atas pertanyaan Bagaimana penerapan Pasal 170 KUHP?

Saksi Ahli menjawab: Unsur yang terdapat dalam pasal 170 kuhp haruslah dilakukan **secara bersama –sama**, terhadap **orang atau barang,** dan **di muka umum** dengan ancaman 5 tahun 6 bulan, namun mengacu kepada ayat 2, hemat saya apabila seseorang dengan sengaja menghancurkan barang / jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka- luka dipidana 7 tahun , yg mengakibatkan luka berat dipidana 9 tahun, dan yang mengakitbatkan maut / kematian dipidana 9 tahun.

* Atas pertanyaan Kaitan dengan urusan bahwa mereka merusak barang sendiri apa ada hal ketertiban umum yang diatur didalam pasal 170 dan konsepnya bagaimana?

Saksi Ahli menjawab: Rumusan delik yang terdapat dalam pasal 170 kuhp, adanya unsur dimuka umum, yang berarti ketertiban umum, dalam hal ini yang dibatasi dalam pasal 170 kuhp adalah ketertiban umum sendiri, yang mana pertimbangan hukum yang akan terjadi apabila merusak barang sendiri adalah apakah **tindakan tersebut membahayakan, merusak atau merugikan orang lain.** Jadi apabila digunakan untuk menyelamatkan orang berarti berlaku sebaliknya, tidak dipidana.

* Atas pertanyaan Apa bisa perbuatan untuk menyelamatkan diri dikenakan pidana?

Saksi Ahli menjawab: Pertama” harus melihat keadaan darurat seperti apa yang di maksud, overmacht (keadaan darurat) sendiri di bagi menjadi 3 :

1. Keadaan yang bersifat mutlak keadaan ini diartikan adalah keadaan dimana orang tidak dapat berbuat hal yang lain lagi, sebagai contoh seseorang yang dihipnotis untuk melakukan tindak pidana,

2. Keadaan yang bersifat relatif, keadaan ini diartikan sebagaimana orang yang dipaksa masih memiliki kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan, sebagai contoh a ditodong pistol oleh b dengan ancaman apabila a tidak membakar rumah tersebut akan ditembak oleh b, Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan.

3. Keadaan yang merupakan suatu keadaan darurat, dalam hal ini seseorang terpaksa dalam melakukan tindak pidana, sebagai contoh untuk menolong seorang yang tersekap dalam rumah yang sedang terbakar, seseorang memecahkan sebuah jendela kaca untuk jalan masuk, orang ini tidak dapat dihukum karena merusak barang tersebut, karena dalam keadaan darurat.

Dan mengacu kepada pasal 48 kuhp yang berbunyi :

*“Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”*

Maka jelas orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan daya paksa tidak dapat dipidana.

* Atas pertanyaan Bagaimana mengetahui motif seseorang dalam tindak pidana?

Saksi Ahli menjawab: Dalam suatu perbuatan adanya actus reus dan mensrea, ada niat dan perbuatan, untuk membuktikan suatu niat harus dilihat terlebih dahulu perbuatannya, dan ada motif, dan modus, motif merupakan alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana, dan modus merupakan cara seseorang untuk melakukan tindak pidana.

* Atas pertanyaan Kualitas vs kuantitas saksi dalam penyidikan. Ada belasan saksi dalam BAP tapi hanya 3 saksi dari warga dimana 2 jd TSK 1 lagi tidak melihat kejadian.

Saksi Ahli menjawab: Sebenarnya bukan banyaknya saksi yang menjadi nilai, tapi kualitas, karena keterangan harus berkaitan satu sama lain, dan memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan pengertian saksi itu sendiri dalam pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan pengertian keterangan saksi terdapat dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yang mana keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, dan apabila saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan alami sendiri maka keterangan saksi tersebut dapat dikatakan testimoni de auditu.

* Atas pertanyaan Harga kaca yang dirusak Rp. 100 ribu sudah diperbaiki esok harinya tapi warga pemilik kaca itu dikenakan TSK 170 itu bagaimana? Kaitannya dengan teori the relevance of court.

Saksi Ahli menjawab: Ada 3 tujuan hukum menurut gustav radbuch, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tidak selamanya segala hal itu mencari mengenai kepastian hukum sebagai contoh, pada kasus nenek mirna yang mencuri 3 biji kakao seharga @15.000 yang berarti keseluruhannya seharga 45.000, dalam kasus ini Hakim hanya menjatuhkan hukuman percobaan kepada nenek mirna, jelas apabila hakim hanya mencari kepastian maka nenek mirna akan dikenakan pasal 362 Kuhp akan tetapi hakim memutus berdasarkan kemanfaatan, apakah bermanfaat jikalau seorang nenek hanya mencuri 3 kakao seharga 45.000 dipidana dengan pasal 362 kuhp yang lama hukumannya 5 tahun?

* Atas pertanyaan Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana?

Saksi Ahli menjawab: seseorang dapat dipertanggungjawaban pidana apabila memiliki kesalahan, adanya dolus (kesengajaan) ada culpa (kelalaian), prof moeliatno tidak mempergunakan istilah tindak pidana yang ada istilah perbuatan pidana karena tidak semua orang bersalah akan dijatuhi pidana lihat pasal 44 kuhp – 51 kuhp, dan mengacu kepada pasal 183 KUHAP terdapat minimum 2 alat bukti di tambah keyakinan hakim, hal ini harus dipenuhi untuk dapat dikatakan bersalah. Kemudian mengenai alat bukti, diatur dalam pasal 184 KUHAP yang mana terdapat 5 alat bukti yang sah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, yang mana tidak ada ketentuan hierarki dalam penggunaanya.

* Atas pertanyaan Bila dalam satu kasus ada unsur perdata vs Pidana mana yang diutamakan? Kalau tidak salah ada PERMA yang mewajibkan perdata dulu.

Saksi Ahli menjawab: terdapat istilah ultimum remedium, yang dapat diartikan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas dalam penegakan hukum, dan ultimum remedium sebagai alat terakir hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi , perdata ataupun hukum administrasi) hendaklah diselesaikan melalui jalur tersebut.

* Atas pertanyaan Jika ada perbedaan keterangan di BAP dengan persidangan yang mana yang akan dipakai?

Saksi Ahli menjawab: Pada intinya hakim yang akan memilih, apakah keterangan di BAP atau kah keterangan di persidangan, akan tetapi pada faktanya keterangan di BAP tidak diambil dibawah sumpah, sedangkan keterangan di persidangan berada di bawah sumpah sehingga keterangan yang memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat adalah keterangan pada saat persidangan.

* Atas pertanyaan Misalkan, ada warga di tempat a kemudian mereka tinggal di sebuah apartemen dan mengalami sengketa dengan developer kemudian ditemukan fakta developer melakukan penggelapan, tidak diproses, namun kemudian ketika ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang pada hakikatnya untuk menyelamatkan orang, dilaporkan oleh developer pasal 170 KUHP kepada penyidik, bagaimana teorinya?

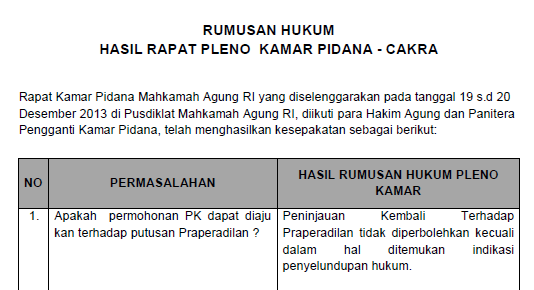
Saksi Ahli menjawab: Pada hakikatnya pasal 9 UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme setiap masyarakat bebas memperoleh informasi mengenai negara, dan polisi termasuk aparatur negara, sehingga polisi wajib memberi tahu informasi mengenai perkara yang dilaporkan, logikanya memang seharusnya terhadap kasus yang sama sudah tau prosesnya, seharusnya ada skala prioritas diantara kedua kasus tersebut, sesuai aturan Perkapolri No 14 Tahun 2011 tentang mekanisme penyidikan tindak pidana.

* Atas pertanyaan Tentang azas mempidanakan orang tak bersalah bagaimana teorinya yang sering disebut dengan kriminalisasi? Untuk memperalat hukum dengan tujuan teror dan tameng PMH yang lebih besar. Bagaimana teorinya?

Saksi Ahli menjawab: Dalam pidana seseorang dapat dipidana apabila memiliki kesalahan geen straft zoonder schuld tiada pidana tanpa kesalahan, sedangkan ada pasal 44 – 51 KUHP tentang alasan pembenar dan penghapus pidana yang didalamnya terdapat alasan pembenar dan pemaaf jadi harus dibedakan penegasan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana karena tidak semua bersalah didepan hukum pidana akan dinyatakan bersalah , harus dilihat pertanggungjawaban nya terlebih dahulu.

Kriminalisasi sendiri adalah tindakan yang bukan pidana kemudian menjadi perbuatan pidana, dan itu dekat dengan kedudukan aparat penegak hukum karena diberi wewenang penuh oleh UU misalnya UU no 16 tahun 2004(kejaksaan), UU no 48 tahun 2009 (kekuasaan kehakiman), UU no 2 tahun 2002 (Polri), kalau mereka melakukan abuse maka mungkin mereka melakukan penyalahgunaan kriminalisasi untuk pihak INVISIBLE HAND.

* Atas pertanyaan Apakah yang dimaksud dengan penyelundupan hukum, kelalaian atau kesengajaan dalam memutus perkara yang bisa di PK ?

Saksi Ahli menjawab: Sema no 4 tahun 2014 

Penyelundupan hukum ini diartikan jika dalam penjatuhan putusan praperadilan ada faktor-faktor tertentu di luar teknis peradilan,” ujar Juru Bicara MA Suhadi di Gedung MA, Rabu (25/2). Sumber : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54edeba8c481c/ma-sebut-peluang-kpk-ajukan-peninjauan-kembali>

Atau tidak menggunakan hukum positif yang ada.

* Atas pertanyaan Apabila dua orang dijadikan TSK namun kesaksian pihak pelapor justru menjelaskan bahwa tidak ada kerjasama atau unsur bersama2 karena memecah kaca hanya sendirian apakah bisa masuk 170?

Saksi Ahli menjawab: Rumusan delik dalam pasal 170 adalah Barang siapa, dimuka umum, bersama – sama, kekerasan, terhadap orang atau barang, jelas tidak bisa dikarenakan dalam delik ini diharuskan dilakukan secara bersama –sama.

* Atas pertanyaan Apakah menyelamatkan diri dan orang-orang lain yang didahului dengan berdiskusi mencari solusi terbaik sebagaimana diungkap di persidangan oleh pihak saksi termohon bisa dikategorikan keadaan darurat sng pemaaf?

Saksi Ahli menjawab: Ketika ada seseorang masih bisa berpikir untuk melakukan dan tidak melakaukan sesuatu tapi untuk menyelamatkan nyawa orang lain maka dia melakukan suatu tindakan maka dia tidak dapat dipidana lihat pasal 48 kuhp, tentang overmacht(kutip) dan overmacht merupakan dasar pembenar bukan dasar pemaaf, overmacht berbeda dengan noodweer, noodweer adalah pembelaan terpaksa yang dibedakan menjadi 2 yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-excess* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam **Pasal 49 KUHP**yang berbunyi:

*(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*

*(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*

Contoh noodweer : a seorang juara tinju, kemudian a ingin dipukul oleh b dan c yang merupakan anak di bawah umur, pembelaan yang dilakukan oleh a cukup menepis / melumpuhkan saja, tidak perlu sampai membalas pukul (alasan Pembenar)

Contoh noodweer exces : istri a diperkosa oleh 10 orang dihadapannya, kemudian dikarenakan a emosi, dan a mengambil samurai dan menebas kepala 10 orang tersebut, hal ini yang dikatakan noodweer exces

* Atas pertanyaan Apakah 170 bisa dikenakan pada kejadian di rumah sendiri dan merusak barang milik sendiri?

Saksi Ahli menjawab: Rumusan delik dalam pasal 170 adalah Barang siapa, dimuka umum, bersama – sama, kekerasan, terhadap orang atau barang, dalam delik ini tidak dikatakan spesifikasi dari barang yang dirusak apakah harus barang milik sendiri atau orang lain, dikarenakan tidak ada aturan yang tegas mengenai barang tersebut, maka masi ada perdebatan apabila dia merusak barang milik sendiri ataupun barang milik orang lain demi kepentingan hukum tidak dapat dipidana, kemudian Dalam proses perkara pidana yang dipegang polisi dikenal adanya sp 3 agar tidak seluruh perkara pidana tidak masuk ke pengadilan, mekanisme sp 3 ini diatur dalam pasal 109 kuhp, yang mana sp3 dapat dilakukan apabila tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan demi kepentingan hukum, dikarenakan ini hanya penganiyaan ringan penyidik dapat melakukan sp3 dengan alasan kepentingan hukum.

* Atas pertanyaan Dalam sidang praperadilan (yang saat ini kami gugat PK) waktu itu dihadirkan saksi ahli. Dia mengatakan 170 bisa dilaporkan oleh siapa saja asalkan menganggu ketertiban umum. Namun rupanya Hakim mengambil hanya sebagian sebab ini bukan urusan ketertiban umum ini adalah milik sendiri untuk menyelamatkan diri dan sudah diperbaiki harganya Rp. 100 rb.. apakah ini bisa disebut penyelundupan hukum?

Saksi Ahli menjawab: Profesor simons pengaturan terhadap ketertiban umum ini di dalam kuhap terdapat di buku 2 bab 5 pasal 154 – 181 kuhp , menurut profesor simons ketertiban umum adalah suatu hal yang memang abstrak untuk diperbincangkan, terhadap ketertiban umum prof simons mengatakan dalam istilah belanda dengan istilah vaag atau dalam bahasa indonesia artinya sesuatu yang kabur sifatnya, pendapat beliau diperkuat oleh van hamel dan van hatum yang menyatakan hal yang sama dan untuk lebih singkatnya ketertiban umum ini mengacu kepada kepentingan masyarakat yang lebih besar dalam memori vantulechting ketertiban umum ini bersifat abstrak dikarenakan beberapa faktor tidak langsung menyangkut tentang keamanan negara, tidak langsung menyangkut tindakan alat alat perlengkapan negara, tidak langsung menunjuk pada harta atau tubuh orang tertentu sehingga memang agak sulit dan menjadi dualisme bahwa pasal 170 kUHP ini termasuk delik aduan atau delik biasa ditambah lagi dalam kasus nya “ nasir mone” 11 januari 2016, pihak kepolisian menyatakan pasal 170 kuhp setelah mengadakan perjanjian damai bentuknya adalah delik aduan karena termasuk penganiayaan ringan, jadi hal ini terjadi penyimpangan hukum, dan mungkin terjadi penyelundupan hukum, yaitu karena ada upaya untuk tidak menggunakan uu nasional dari negara ini karena untuk masing- masing penyidik bisa berbeda untuk pendekatannya berikut kutipannya :

Status tersangka Irfan Darmawan dan Hendra Gunawan resmi dicabut setelah korban Bripka Mulyadi telah mencabut laporannya, Senin (11/1/16). “Sudah damai makanya proses hukumnya dihentikan, soalnya ini kan delik aduan,” kata Kapolsek Mariso Kompol Choiruddin Wahid Kepada Pojoksulsel.com, Senin (11/1/2016). Kompol Chairuddin mengatakan, kasus penganiayaan ini masuk kategori delik aduan. “Artinya jika pelapor sudah mencabut laporannya dan sepakat untuk berdamai, maka proses hukum dihentikan,” bebernya. , <http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/01/11/kasus-anak-nasran-mone-pukul-polisi-berakhir-damai-ini-penjelasan-polisi/>

**C. KELALAIAN / KEKHILAFAN/ KESENGAJAAN / KESEWENANGAN**

**HAKIM TUNGGAL VIKTOR PAKPAHAN SH.,MH. PADA**

**PUTUSAN PRA PERADILAN 01/PID.PRAP/2016/PN.JKT.PST.**

**ADANYA SUATU KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA JUDEX FACTIE**

JUDEX FACTIE dalam tingkat Pertama telah melakukan KEKHILAFAN atau KEKELIRUAN YANG NYATA dengan tidak memenuhi syarat–syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Azas VORMVERZIUM dalam putusannya, karenanya JUDEX FACTIE Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangannya :

Bahwa, pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa/ PEMOHON PK telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 170 KUHP atas fakta-fakta sebagai berikut :

**Kekhilafan 1**: Bahwa PUTUSAN Perma No.01 Tahun 1956 bahwa apabila ada latar belakang Perdata maka Pidana tidak diperbolehkan atau Perdata diselesaikan terlebih dahulu dengan SENGAJA diabaikan dalam Putusan.

**Kekhilafan 2**: Bahwa sepakat dengan Pakar Sejarah Hukum Kolonial Amerika bernama Garreth Wiggan dari Canada berjudul “THE RELEVANCE OF COURT” risetnya mengulas bagaimana Proses penyelidikan dan penyidikan hingga sidang-sidang pengadilan yang digunakan untuk mengkriminalisasi pejuang-pejuang Kulit Hitam sebagai alat untuk mendikte MINDSET agar orang-orang Kulit Hitam di Amerika mengikuti semua aturan main yang didiktekan oleh Pemerintah Kolonial melalui prosedur hukum. “Relevansi Keadilan” tersebut contohnya membawa seorang Ibu kulit Hitam ke Pengadilan karena duduk di Bus bagian Depan yang tertulis “BLACK NOT ALLOWED”, dalam kasus ini bisa diterapkan untuk dua (2) hal:

* + 1. KACA PECAH seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah), dan inipun sudah lumayan ada peningkatan, sebelumnya GEMBOK Rp.25ribu untuk Perkara No.08/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST dan No. 09/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.PST dijadikan PERKARA untuk menangkap dan menjadikan 2 warga Rusun salah satunya Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi Pemilik dan Penghuni Rusun GCM sebagai TERSANGKA, yang kayaknya seolah-olah relevan untuk sebuah proses peradilan yang memakan waktu tenaga energi melibatkan Yang Mulia Hakim dan Panitera, puluhan warga, puluhan polisi, puluhan (karyawan, satpam, preman berbadan besar-besar) untuk mempersoalkan dengan cara berpanjang-lebar, bertele-tele, demi tegaknya hukum dan keadilan. Pertanyaan (yang sering tidak terungkap di persidangan) Semua itu untuk kepentingan siapa? TIDAK RELEVAN dibawa ke Pengadilan bahkan terkesan SANGAT DIPAKSAKAN. Seharusnya justru dipertanyakan latar belakangnya.
    2. SAKSI Helka Raya ketika ditanya oleh Termohon: “Tongkat Satpam yang anda pegang dirampas atau dipinjam?, Helka menjawab tegas: “dirampas”. Namun, ketika Helka Raya ditanya oleh Johannis Vityn “apakah anda dengar saya bertanya - kamu mau selamat?”, Seprudin menjawab: “Ya saya dengar”. Dalam Jawaban Termohon juga tertuang jelas bagaimana terjadi DIALOG antara warga dengan satpam di ruang PPRS, walau ada beda persepsi tentang apa yang perlu diselamatkan (“nyawa” menurut warga atau “asset”/kaca menurut satpam), terlalu dipaksakan kata DIPINJAM atau DIRAMPAS. Artinya sama-sama memahami adanya sebuah suasana GENTING namun berbeda persepsi. Bukan tidak ada suasana GENTING. Dialog antara Johannis Vityn & Aboen (majikan nya PT Duta Pertiwi Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk yang majikannya Satpam) dengan Satpam menjadi LUCU karena seharusnya Johannis Vityn dan Aboen tinggal memerintahkan saja kepada satpam (karyawannya PT Duta Pertiwi Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk yg babunya Johannis Vityn & Aboen) untuk memecah kaca miliknya. TIDAK RELEVAN dibawa ke Pengadilan bahkan terkesan SANGAT DIPAKSAKAN. Seharusnya justru dipertanyakan latar belakangnya.

**Kekhilafan 3:** Bahwa KETERANGAN AHLI, Sdr. DJISMAN SAMOSIR, SH.,MH dengan sengaja DIHILANGKAN SEBAGIAN, HANYA DIAMBIL SEPOTONG UNTUK KEPENTINGAN yang patut diduga PESANAN PIHAK TERTENTU sehingga MAKNA menjadi amat berbeda dan menyesatkan. Yang dikutip oleh Hakim Tunggal hanyalah soal “Status Pelapor Budhi Basaruddin sebagai Property Manager PT Duta Pertiwi Tbk

Saksi Ahli C. Djasmin Samosir SH, MH, pada intinya menyatakan bahwa:

* + - 1. “*Pasal 170 bukan delik aduan, sehingga siapapun boleh melaporkan*”

Hanya frasa ini yang dikutip dalam pertimbangan Putusan, selebihnya dengan sengaja diabaikan, padahal justru mengandung unsur signifikan yang membuktikan bahwa unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP sama sekali tidak terpenuhi. Bagaimana mungkin perbuatan untuk perbuatan seorang diri dan untuk menyelamatkan nyawa orang banyak harus dipidana.

* + - 1. “*Pasal 170 haruslah barang milik orang lain, kalau merusak barang milik sendiri tapi dilakukan di depan umum sehingga menganggu pihak lain maka bisa dikenakan pasal mengganggu ketertiban umum*”.

Bukti ternyata TKP adalah pekarangan rumah sendiri, Rumah Susun sama sekali bukan tempat umum, Pemohon I dan II adalah pemegang SHM SRS (Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun) dimana TKP berada pada Bagian Hak Bersama yang tercantum dalam SHM SRS masing-masing. Pemohon I dan II juga Pembayara PBB atas ruang TKP yang kacanya terpaksa dipecah tersebut.

* + - 1. “*Ketika Milik orang lain dalam hal ini bukti kepemilikannya belum pernah dibaliknama apakah itu bisa disebut milik orang lain. Syarat2 kepemilikan soal tanah bukti kepemilikan adalah sertifikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Sepanjang tidak ada orang lain yang menggugat. Apabila menyangkut bangunan itu melekat dengan tanah dan siapa pemilik tanah itu*”. Sebagai pemilik atas TKP juga sudah dibuktikan bahwa Pemohon I dan II adalah Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan atas TKP tersebut.

**Kekhilafan 4**: TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang dijadikan dasar untuk menjadikan TERSANGKA adalah ASET milik warga yang digelapkan oleh PT Duta Pertiwi Tbk, Majikan dari Pelapor (Budhi Basarudin Property Manager PT Duta Pertiwi Tbk). FAKTA ini juga diabaikan secara total oleh Hakim Tunggal sbb:

Dalam hal GCM bukti kepemilikan sudah komplit **(BUKTI P-8)** yaitu:

* + - * + SHM SRS a.n. segenap Pemilik Sarusun termasuk Pemohon I dan II.
        + AJB yang didalamnya tercantum “jual beli juga meliputi lahan bersama, bagian bersama, benda bersama”.

Bukti kepemilikan tersebut didasarkan dan diperkuat dengan:

* + - * + SK Gubernur 1204 Tahun 1997 tentang Pertelaan Kawasan Hunian dan Non Hunian Graha Cempaka Mas. Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
        + Dokumen Serah Terima Daftar Pertelaan dari Ex pengembang (PT Duta Pertiwi Tbk) kepada Warga atasnama PPRSC GCM. Tanggal 22 Desember 1999.

Bahwa betul TKP pada tahun 1997 disertipikatkan menjadi a.n. PT. Duta Pertiwi selaku pengembang, namun perbuatan mensertipikatkan bagian bersama tersebut adalah penggelapan hak, dan karenanya telah kami LP kan ke Polres dengan Nomer 942/K/VII/15/RESTRO JAKPUS Tanggal 1 Juli 2015 namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Sementara itu Pemohon III, IV telah melakukan upaya diluar Pengadilan maupun melalui Pengadilan, sbb:

1. Pertama. menggugat praperadilan di PN Jakpus ini melawan OJK, Dirjen Pajak, dan BEI untuk melanjutkan penyidikan terhadap praktek-praktek bisnis illegal PT Duta Pertiwi Tbk yang melanggar UU Pasarmodal dan UU Rusun.
2. Kedua. Karena surat permohonan kepada Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN dan Kepala Kantor BPN Administratif Jakarta Pusat sudah 5 kali tidak ditanggapi, maka PPRSC GCM mendaftarkan Permohonan ke Pengadilan TUN untuk membaliknamakan SHGB dan 27 SHM Bagian Bersama Milik warga GCM.
3. Ketiga. Warga sudah melaporkan PMH PT Duta Pertiwi Tbk ada sejumlah 32 LP diantaranya soal penipuan dan penggelapan asset bersama milik warga.

Pemohon I dan II beserta segenap Pemilik Sarusun sudah memenuhi Kewajiban Kepada Negara. Pemilik Sarurun dalam Transaksi Pembelian Sarusun membayar pajak jual beli (BPHTB) dan PNBP kepada BPN, disamping itu setiap tahun pemilik sarusun juga membayar PBB. Di dalam PBB SARUSUN juga tercantum 3 macam komponen yaitu pajak untuk unit masing-masing bangunan, pajak bumi bersama, dan pajak bangunan bersama.

**Kekhilafan 5:** Bahwa KETERANGAN AHLI SIMSON MUNTHE SH MH dengan sengaja DIABAIKAN SECARA TOTAL.

Saksi Ahli Simson Munthe SH, MH, mengatakan Soal kepemilikan TKP yang kebetulan berada di bagian bersama milik warga GCM, diatur dalam Pasal 46 UU 20/2011 dan juga tercantum dalam AJB (Akte Jual Beli) maka tidak boleh disertifikatkan atasnama Pengembang, dan lalu dijadikan bukti kepemilikan untuk dasar menetapkan warga pemilik sebagai TERSANGKA dengan melanggar Pasal tersebut. Disinilah tidak hanya soal adanya dua (2) bukti dianggap cukup, harus dilihat juga KUALITAS dari barang bukti yang dimaksud, serta RUJUKAN UU yang menjadi dasar hukum dari barang bukti nya wajib dijadikan pertimbangan, supaya penetapan itu memiliki dasar hukum yang kuat, dan kalau dipaksakan untuk dilimpahkan ke pengadilan maka akan membuang waktu, tenaga, energi dengan hasil yang seringkali justru mencederai rasa keadilan.

Tentang penyelidikan dan penyidikan yang tidak berkualitas tersebut dan kaitannya dengan praktek mafia hukum yang mencederai rasa keadilan pernah disampaikan dalam Pidato Peluncuran ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara), November 2015 di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, oleh Sekjen ARUN, Sdr. Bob Hasan Pasaribu, SH, MH., dikatakannya bahwa modus operandi konspirasi mafia hukum untuk menjalankan persidangan dengan input penyelidikan dan penyidikan yang kualitasnya rendah dan tidak jarang ruang sidang dijadikan ajang transaksi pemerkosaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian rakyat mencemooh dengan singkatan KUHP (Kasih Uang Habis Perkara), khususnya Pasal 170 diartikan sebagai Barang siapa (para pekerja Hukum) dengan sengaja (dan terencana) melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap REJEKI yang seolah-olah HALAL bermula dari rendahnya kualitas penyelidikan dan penyidikan yang sengaja dipaksakan untuk motif komoditi transaksional sehingga perlu dibuat berpanjang-lebar dan bertele-tele untuk menjadi modus bancakan bersama-sama bagi para pihak yang terlibat didalamnya, dengan kekerasan (terhadap pihak yang menjadi korban kemanusiaan/menjadi tersangka hal yang dibikin-bikin), yang akibatnya menghancurkan reputasi dan integritas para pekerja/pegiat hukum itu sendiri. Dalam era demokrasi dan keterbukaan, rakyat sudah cerdas dan memahami apa yang sesungguhnya terjadi dengan praktek “KUHP 170” tadi.

SAKSI AHLI Sdr. Simson Munthe SH MH, Disinilah tidak hanya soal adanya dua (2) bukti dianggap cukup, harus dilihat juga KUALITAS dari barang bukti yang dimaksud menjadi sangat penting. Sejalan dengan Pakar Psikologi Kriminologi Belanda Pieter Zwitser dalam bukunya “ZOORCA” disitu jelas sekali menguraikan fenomena THE PSYCHOPATH OF INVESTIGATOR, bagaimana proses kelainan jiwa karena “presumptions on motives / assumptions on mindset” yang dialami oleh penyidik ketika mencincang kejadian lalu merekonstruksi kembali dengan menghilangkan UNSUR-UNSUR Psikis/psikologis/rasa kemanusiaan saat kejadian dengan saat rekonstruksi. Sehingga bisa dilihat jelas tidak hanya MOTIF Tersangka yang perlu dilihat tetapi juga MOTIF Penyidik menjadi terang benderang dengan penerapan teori ini. Teori ini dianggap lebih egaliter dan lebih jujur dan lebih adil dalam melihat suatu perkara. Dalam kasus ini, “Dua orang Satpam bergegas (tergesa, berlari kecil) masuk ke ruangan PPRS dengan tangan menutup hidung (karena ada asap), dibukakan pintu oleh Johannis Vityn, yang lalu didalam ruangan itu berdebat tentang penyelamatan diri, lalu satpam bilang kalau didalam ruang tidak ada asap, lalu ditanya Hakim satpam bilang bisa bertahan 10 menit”. Ketika menetapkan jadi TERSANGKA Pasal 170 maka bunyinya menjadi begini: Secara bersama-sama (Johannis Vityn dan Aboen) dengan kekerasan (merampas tongkat Satpam dan kursi) merusak (memecah kaca) barang orang lain (milik PT Duta Pertiwi Tbk) maka terpenuhi unsur2nya untuk menjadikan TERSANGKA dimana UNSUR-UNSUR psikis/psikologis/rasa kemanusiaan seperti membukakan pintu untuk satpam yang bergegas/tergesa-gesa dengan tangan menutup hidung masuk ke ruangan, dialog tentang bagaimana cara penyelamatan diri, dst. Teori tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana kelainan jiwa dari penyidik kehilangan rasa/psikis/psikologis (kategori “first degree of insanity” kalau referensinya Sigmund Freud), apabila tidak ada motif lain dengan kesadaran.

**TERBONGKAR DALAM PERSIDANGAN: KONTEKS MAKRO (LATAR BELAKANG) KRIMINALISASI MELALUI TANGAN APARAT POLISI UNTUK TAMENG BISNIS ILEGAL PT DUTA PERTIWI TBK, NAMUN HAKIM TUNGGAL MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN TSB.**

**Kekhilafan 6:** Kesaksian Mayor Jenderal TNI (Purn) Saurip Kadi diabaikan secara total oleh Hakim Tunggal. Demikian juga Kesaksian Korban Kriminalisasi PT Duta Pertiwi Tbk yang lainnya (Sdr. Kho Seng Seng, Sdr. Mardiyanta, Sdr. Fifi Tanang) diabaikan secara total.

Kejadian yang sama persis dengan perkara ini hanya beda obyek, kalau dulu merusak GEMBOK (seharga Rp. 50 ribu), sekarang merusak KACA (seharga Rp. 100 ribu), 2 orang warga juga dijadikan TERSANGKA. Bahkan Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi bersama 4 orang warga pernah ditangkap oleh Kapolsek Kemayoran dan anak buahnya, justru bukan para preman yang menyerbu rumah kami yang ditangkap Polisi, bukti bahwa POLRES JAKPUS menjadi ALAT STATE TERORISM dan VANDALISM dari PT Duta Pertiwi Tbk. Itu kejadian Januari tahun 2014.

Kesaksian Kho Seng Seng (Pemilik Kios di ITC Manggadua), Fifi Tanang (Pemilik Apartemen di Manggadua Court), Mardiyanta (Pemilik Kios di ITC Manggadua), MayjenTNI (Purn) Saurip Kadi (Pemilik Apartemen di Graha Cempaka Mas) yang semuanya dikriminalisasi dengan memperalat Polisi dan bahkan untuk Perkara No. 08/Pid.Prap/2015/PN. JKT.PST (Penangkapan Tidak Sah) dan No. 09/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST (Penetapan Tersangka Tidak Sah) dimana Polisi dikalahkan karena nyata-nyata penyalahgunaan wewenang dan melanggar prosedur demi pesanan PT Duta Pertiwi Tbk sudah terungkap dalam Persidangan maupun tercantum dalam Putusan, SAMA SEKALI tidak menjadi pertimbangan Hakim Tunggal apalagi menggerakan hati nurani dan moral sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan di muka bumi, justru sebaliknya memberi keberanian untuk dirinya ikut menjadi ALAT MAFIA (PT Duta Pertiwi Tbk) dengan mencelakakan pihak yang tidak bersalah sebagaimana yang sudah terjadi terhadap saksi-saksi tersebut. MANUSIA semacam ini sesungguhnya TIDAK LAYAK menjadi HAKIM, dan PUTUSAN nya jelas merusak dan menghancurkan CITRA PERADILAN karena pada dasarnya masyarakat memiliki hati nurani, moral, dan sama sekali tidak bodoh.

**TERBONGKAR DALAM PERSIDANGAN: ADANYA PERKARA YANG SAMA PERSIS, PARA PIHAK SAMA PERSIS, TKP JUGA SAMA (GCM), DAN SUDAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN NAMUN TIDAK DIJADIKAN YURISPRUDENSI. NAMUN HAKIM TUNGGAL MENGABAIKAN YURISPRUDENSI TERSEBUT.**

**Kekhilafan 7**: **MENGABAIKAN YURISPRUDENSI**

Putusan Pengadilan atas 2 Perkara dimenangkan warga Pemilik Penghuni GCM sbb:

1. Putusan Pra Peradilan dengan Perkara Nomer: 08/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST telah menetapkan PENANGKAPAN 4 warga Rusun GCM oleh Polisi (Polres Jakpus) dinyatakan tidak SAH.
2. Putusan Pra Peradilan dengan Perkara Nomer: 09/Pid.Prap/2015/PN.JKT.PST telah memutuskan bahwa Penetapan sebagai TERSANGKA dibatalkan.

**Kekhilafan 8:** Bahwa PMH PT DUTA PERTIWI TBK sebagai Konteks Makro Kejadian Perkara yang SUDAH diketahui publik sebagai LATAR BELAKANG untuk memperalat Polisi di banyak kasus yang terjadi (ITC Manggadua, ITC Roxy Mas, Apartemen Manggadua Court, Apartemen Grha Cempaka Mas, dll dibawah pengelolaan PT Duta Pertiwi Tbk) namun SAMA SEKALI tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Tunggal seolah Kejadian di Ruang Hampa (Out of Context).

Pengembang memiliki KEWAJIBAN untuk menyerahterimakan lahan bersama, bagain bersama, benda bersama selambat-lambatnya 1 tahun setelah unit pertama terjual. Yang dimaksud serah terima juga wajib termasuk membaliknamakan SHGB dan SHM untuk lahan bersama dan bagian bersama kepada warga atasnama wali amanah yaitu P3SRS. Bahwasanya Ruang P3SRS milik bersama warga di Lantai 5 Tower C1 yang faktanya masih atasnama PT Duta Pertiwi Tbk yaitu SHM 175/V/C Kelurahan Sumurbatu itu adalah bukti Pengembang yang tidak punya ikhtikad baik karena Pertelaan sudah ada SK Gubernur dan serah terima sudah dilakukan seharusnya diikuti dengan baliknama. Kalau tidak dilakukan, itu masuk dalam penipuan dan penggelapan hak karena PT Duta Perrtiwi Tbk adalah perusahaan terbuka yang APPRAISAL (VALUATION) atas perusahaan terbuka berdasar bukti formil, termasuk asset-asset milik warga yang BELUM dibaliknamakan kepada pemilik yang berhak. Belum lagi kalau bicara penggelapan dana milik warga yang masuk ke rekening PT Duta Pertiwi Tbk sehingga sampai kiamat di Pengadilan manapun di seluruh dunia, Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk tidak akan bisa mempertanggungjawabkan kepada warga pemilik dana tsb. Prinsip PPRS Nirlaba. Ini sudah menyalahi prinsip standard akuntansi nasional maupun global. Dan untuk itu kami warga GCM sudah melakukan tiga (3) upaya hukum sebagaimana dijelaskan diatas.

**TERBONGKAR DALAM PERSIDANGAN: PENYIDIKAN CACAT PROSEDUR, KUALITAS RENDAH, PESANAN MAFIA, ALAT BUKTI RONTOK NAMUN HAKIM TUNGGAL MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN TSB.**

**Kekhilafan 9**: SAKSI SEPIHAK. Dari cara pencomotan SAKSI secara sepihak terbukti dalam JAWABAN TERMOHON yang tercantum sebagai SAKSI ada total 7 orang semuanya adalah para karyawan/satpam PT Duta Pertiwi Tbk. Selain 2 orang TERSANGKA hanya ada satu SAKSI warga yaitu Sdr. Tonny Soenanto yang hanya dicomot untuk diambil kalimat penyambung/pembenar karena Tonny Soenanto dkk sebagai TERLAPOR “…. Saya tidak ada di TKP, waktu saya datang sudah berantakan semua, ya saya lihat Sdr. Johannis Vityn ada disitu”.

**Kekhilafan 10**: SAKSI ASAL COMOT. Semua kesaksian yang dikutip dalam Jawaban Termohon bersumber dari konfirmasi SAKSI melihat REKAMAN CCTV dan hanya 2 Saksi yaitu Seprudin dan Helka Raya yang melihat langsung di Ruangan PPRS tempat kejadian, padahal di ruangan PPRS itu ada beberapa warga pemilik penghuni GCM mengapa tidak dipanggil untuk dijadikan SAKSI semuanya kan tidak terlalu banyak. Di CCTV juga jelas siapa-siapa saja yang ada di ruangan itu. Mengapa hanya Seprudin dan Helka Raya saja?

**Kekhilafan 11**: KEBELET (TERBURU-BURU) untuk menetapkan status TERSANGKA seperti Orang mau EEK (BAB) tidak bisa ditahan. Penetapan status TERSANGKA tanpa menunggu BAP dari Sdr. Yulianti. Atas Surat Panggilan Polres Jakarta Pusat No. S.Pgl/5142/S.14/X/2015/Res JP tanggal 2 Oktober 2015 **(Bukti P-50)** tersebut, Sdri. Yulianti sudah hadir namun Penyidik ternyata sakit dan Sdri. Yulianti sudah meninggalkan pesan lewat SMS silahkan dipanggil kembali, namun BELUM dilaksanakan sampai sekarang. Sehingga melanggar azas kepatutan keseimbangan saksi dari dua belah pihak apabila latar belakang kejadian ada motif konflik antar pihak. Rakyat awam komentarnya “Itu namanya PAHECE (Paket Hemat Cepat) pesanan pakai batas waktu, kalau lewat waktunya bablas angine”.

**Kekhilafan 12**: Bahwa 2 (dua) alat bukti yang mendasari hakim tunggal menjatuhkan putusan adalah 2 (dua) orang saksi yaitu SEPRUDIN dan HELKA RAYA yang TAMPAK JELAS direkayasa dan lantas terbukti KESAKSIAN NYA di persidangan BELEPOTAN sbb:

* 1. SAKSI Helka Raya & Seprudin ketika ditanya oleh Termohon pada awalnya menjawab “tidak ada asap”, namun setelah dikonfirmasi ulang oleh pertanyaan Liauw Fie Boen dan Johannis “Mengapa anda lari masuk ke ruangan PPRS?”, mereka jawab “Ya karena ada asap”
  2. SAKSI Helka Raya & Seprudin ketika dikonfirmasi oleh Liauw Fie Boen apakah benar anda berdua masuk ke ruangan PPRS dengan menutup hidung. Mereka jawab: “ya benar”. Pertanyaan lanjut “Karena apa anda menutup hidung?”, mereka jawab: “karena ada asap”.
  3. Ketika HAKIM mengelaborasi dengan pertanyaan: “Anda tahan berapa lama dengan keadaan itu?”, Seprudin menjawab: “sepuluh menit”.
  4. SAKSI Seprudin ketika ditanya oleh Johannis Vityn “siapa yang membukakan pintu ruangan PPRS ketika Seprudin masuk?”, Seprudin menjawab: “Bapak Johannis”.
  5. SAKSI Seprudin ketika ditanya Termohon “apakah melihat pak Johannis memecahkan kaca, dengan apa dipecahnya?” Dia jawab: “Ya melihat, betul Pak Johannis memecah kaca dengan kursi”. Ketika ditanya oleh Sdr. Johannis: “anda lihat saya pukul dengan kursi langsung pecah?”. Dia jawab: “ya betul langsung pecah”. Ini berbeda dengan keterangan Helka Raya ketika ditanya Termohon: “Siapa yang memecah kaca?”, dia jawab: “Pak Johannis pakai kursi dan Pak Aboen pakai tongkat”.
  6. SAKSI Helka Raya ketika ditanya oleh Termohon: “Tongkat Satpam yang anda pegang dirampas atau dipinjam?, Helka menjawab tegas: “dirampas”. Namun, ketika Helka Raya ditanya oleh Johannis Vityn “apakah anda dengar saya bertanya - kamu mau selamat?”, Seprudin menjawab: “Ya saya dengar”. Dalam Jawaban Termohon juga tertuang jelas bagaimana terjadi DIALOG antar warga dengan satpam di ruang PPRS, hanya ada beda persepsi tentang apa yang perlu diselamatkan (“nyawa” menurut warga atau “asset”/kaca menurut satpam), artinya sama-sama memahami adanya sebuah suasana GENTING namun berbeda persepsi. Bukan tidak ada suasana GENTING.
  7. SAKSI Helka Raya & Seprudin ketika ditanya “untuk apa disiapkan begitu banyak apar”, awalnya menjawab: “tidak tahu”, namun ketika ditunjukkan FOTO dimana koridor masih jernih, lalu ada semprotan asap dari arah kantor pengelola dan ruangan PPRS, menjawab: “Ya benar itu semprotan APAR, itu kantor pengelola, namun tidak tahu siapa yang menyemprotkan APAR itu”.

**Kekhilafan 13**: **MENGABAIKAN YURISPRUDENSI kemenangan PPRSC GCM murni warga di PN Jakpus demi memaksakan kepentingan PT Duta Pertiwi Tbk melalui PPRSC Bonekanya yang sudah tidak memiliki ALAS HAK berada di Kawasan GCM.**

Putusan Pengadilan atas 2 Perkara dimenangkan warga Pemilik Penghuni GCM yang tergabung dalam wadah PPRSC-GCM Hasil RULB 20 September 2013 sbb:

Pada tanggal 13 Januari 2015 Pengadilan PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Perkara Perdata No. 510/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst bahwa Gugatan EX Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” karena gugatan kabur.

Pada tanggal 8 Desember 2015 Pengadilan PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst bahwa Gugatan baru untuk ke 2 kalinya oleh Ex Pengurus PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk kembali dinyatakan “Tidak Diterima”.

Disisi lain tanpa RULB sekalipun sejak 5 Februari 2015 masa bhakti ex Pengurus PPRS Pimpinan Agus Iskandar (Boneka PT Duta Pertiwi Tbk) telah berakhir. Dengan demikian paska ke 2 Putusan Pengadilan PN Jakarta Pusat tersebut diatas, keabsahan Hasil RULB 20 September 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Stephanie Maria Lilianty No. 60, 61, 62, 63 Tahun 2013 **(Bukti P-6)** dan Akta Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah No. 14,15, 22 Tahun 2015 **(Bukti P-24)** yang antara lain memuat:

1. Pemberhentian Kepengurusan PPRSC GCM Pimpinan Agus Iskandar,
2. Pengangkatan Kepengurusan PPRSC GCM pilihan Warga Pimpinan Tonny Soenanto,
3. Pemberhentian PT. Duta Pertiwi sebagai Pengelola Rusun Graha Cempaka Mas.

**Menjadi ABSOLUT SAH SECARA HUKUM atau BERKEKUATAN HUKUM TETAP.**

Dengan demikian implikasi dari 2 Putusan Pra Peradilan diatas dapat diringkas sbb:

1. Bahwa UU Nomer 20/2011 menjelaskan Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Barang Bersama sepenuhnya milik bersama segenap Pemilik Sarusun GCM, bukan milik PT Duta Pertiwi Tbk selaku Pengelola sesuai Bukti SHM dan AJB sarusun yang dimiliki oleh sekitar 750 warga GCM pemilik 1046 unit Sarusun GCM serta SK Gub DKI 1204/1997 Daftar PERTELAAN Kawasan GCM telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan.
2. Bahwa SHGB No. 210 Kawasan GCM Kelurahan Sumur Batu belum dibaliknamakan kepada para pemilik atasnama PPRSC GCM (wali amanah sesuai UU 20/2011), dan telah terjadi penggelapan hak atas 27 Ruang pada Hak Bersama, dan untuk hal tersebut sudah dilaporkan LP No. 942/K/VII/2015/ RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015. Terlapor Lie Jannie Harjanto (Dirut PT Duta Pertiwi Tbk dkk.).

**TERBONGKAR DALAM PERSIDANGAN: TIDAK ADANYA GELAR PERKARA TERHADAP SEJUMLAH LP TERKAIT OBYEK TKP YANG SAMA, NYATANYA SEJUMLAH LP WARGA DIPETIESKAN SEDANGKAN LP PT DUTA PERTIWI TBK DENGAN SECEPAT KILAT MENJADIKAN WARGA TERSANGKA. NAMUN HAKIM TUNGGAL MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN TSB.**

**Kekhilafan 14**: Ada sejumlah LP Warga di POLRES Jakpus yang melaporkan PMH PT Duta Pertiwi Tbk. Berikut ini adalah Daftar LP Warga dan Daftar PMH PT Duta Pertiwi Tbk yang dilaporkandi POLRES JAKPUS namun LP Warga di PETI ES kan oleh Polres Jakpus.

* + - 1. **Daftar LP Warga di Polres Jakpus yang di PETI ES kan.**
  1. Sdri. Maureen Frances dengan LP Nomer:LP 941/ K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 dengan tuduhan pasal 372,263,266, 378,385 pemalsuan keterangan, tipu muslihat & penggelapan dana penyewaan asset warga untuk parkir, kantin, papan iklan, dll tanpa seijin Pemiliknya yang Sah yaitu segenap Pemilik Sarusun GCM sesuai NPP masing-masing yang tata cara nya telag diatur dalam Pasal 14 ART PPRSC GCM **(Bukti P-45).**
  2. Sdri. Jannie Bong dengan LP Nomer: 940/K/VII/2015/RESJP 1 Juli 2015 dengan tuduhan Pasal 263, 266, 372, 378 pemalsuan keterangan, tipu muslihat & penggelapan dana penyewaan rooftop untuk BTS (base transmission station) tanpa seijin yang punya yaitu segenap Pemiik Sarusun sesuai NPP masing-masing **(Bukti P-46)**,
  3. Sdr. Suresh Bhagwandas Bhavnani dengan LP Nomer: 939/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 dengan tuduhan pasal penggelapan (372), perbuatan curang & tipu muslihat (378), pemalsuan keterangan (263,266) karena mark up tarif Listrik, Pemalsuan Air dan pengguaan Sinking Fund (Dana Cadangan murni milik warga) yang selama 15 tahun tanpa dipertanggung jawabkan **(Bukti P-47)**
  4. Sdri. Justiani dengan LP Nomer: 942/ K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Justiani pasal 372,378,385 penipuan, penggelapan dan penggelapan asset milik warga. **(Bukti P-44)**
  5. Sdri. Justiani dengan LP Nomer: 943/ K/VII/2015/RESTRO JAKPUS 1 Juli 2015 Pelapor Justiani pasal 372,263,266,378,385 pemalsuan keterangan, tipu muslihat, penggelapan dana IPL warga 17 tahun dan penyalahgunaan wewenang dan pembiaran kejahatan (421, 423, 424) oleh Ika Lestari Aji (Kadisperum DKI) dan Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI). **(Bukti P-48)**
     + 1. **Daftar PMH PT Duta Pertiwi Tbk yang di LP kan oleh Warga di Polres Jakpus**
          1. Sertipikat HBG Induk TIDAK DI BALIK-NAMA KAN. Hak atas Tanah Bersama (HGB Induk) sudah 17 tahun belum dibalik nama kepada pembeli yaitu kepada PPRS selaku Wali Amanah. Dengan tidak dibalik nama, artinya bagi PT Duta Pertiwi Tbk yang berstatus Perusahaan TBK, Tanah dan Bangunan Apartemen tetap sebagai Asset Perusahaan TBK yang ikut dihitung dalam menentukan harga SAHAM.
          2. PT Duta Pertiwi Tbk berkonspirasi dengan Pengurus PPRS bonekanya mensertifikatkan 27 SHM Bagian Bersama milik bersama warga GCM yang sudah diserahterimakan sesuai SK Gub 1204/1997 tentang Pertelaan. Hal mana untuk keuntungan PT Duta Pertiwi Tbk.
          3. PT Duta Pertiwi Tbk berkonspirasi dengan Pengurus PPRS boneka nya menaikkan Tarif IPL tanpa persetujuan warga.
          4. PT Duta Pertiwi Tbk berkonspirasi dengan Pengurus PPRS boneka nya tanpa persetujuan dari pemilknya yang sah menyewakan Bagian dan Barang Bersama milik Warga, seperti kantin, Atap Bangunan untuk “Base Transmition Station” (BTS), bisnis parkir termasuk terhadap penghuni, tanpa dipertanggung jawabkan kepada warga.
          5. PT Duta Pertiwi Tbk berkonspirasi dengan Pengurus PPRS boneka nya, kemudian menaikkan tarif listrik antara 37 s/d 57% dari tarif resmi Pemerintah.
          6. PT Duta Pertiwi Tbk berkonspirasi menjual secara illegal air hasil olahan limbah warga (kualitas 0.08) dengan harga tarif resmi Pemerintah/PDAM (kualitas 0.02).
          7. PT Duta Pertiwi Tbk berkonpirasi dengan Pengurus PPRS Bonekanya, menggunakan Uang Cadangan (Sinking Fund) yang murni milik warga, tanpa direncanakan dan dipertanggung jawabkan kepada Warga melalui forum musyawarah warga yaitu RUTA atau RULB.
          8. PT Duta Pertiwi Tbk berkonspirasi dengan Pengurus PPRS boneka nya menggelapkan hak atas keuntungan polis asuransi yang dibayar oleh warga, namun pihak penerima benefit/keuntungan dari asuransi adalah PT Duta Pertiwi Tbk
          9. PT Duta Pertiwi Tbk berkolaborasi dengan Pengurus PPRS Boneka nya memungut PPN atas Air dan Listrik, padahal negara tidak mengenakan PPN atas Air dan Listrik (Kategori B-3). Disisi lain PPN hanya terjadi ketika terjadi Jual Beli. Sementara PPRS sendiri adalah lembaga NIRLABA.
          10. PT Duta Pertiwi Tbk yang berstatus perusahaan Tbk telah menyimpan dan menggunakan uang warga (PPRS) tanpa alas hukum yang sah. Padahal uang warga yang ditarik oleh PPRS tidak boleh disimpan pada rekening badan hukum yang berorientasi profit yang mengadung resiko rugi atau bahkan pailit sebab PPRS adalah lembaga nirlaba sebagai wali amanah pemilik penghuni rusun.
          11. Dan bisnis illegal tersebut menjadi serius di mata dunia karena dilaksanakan oleh PT Duta Pertiwi yang berstatus sebagai perusahaan Terbuka (Go Public), dan mengambil uang dari pasar uang di Negara lain, karena hal tersebut adalah pelanggaran yang mendasar terhadap UU Pasar Modal dan aturan main dunia finansial secara global.

**Kekhilafan 15: PUTUSAN HAKIM TUNGGAL bahwa KUHP Pasal 170 boleh dilaporkan oleh siapa saja adalah ALASAN SESAT. Sebab berimplikasi bahwa:**

1. Mengabaikan kepemilikan barang.
2. Menganggu kepentingan umum maka bisa dilaporkan oleh siapa saja padahal kenyataannya TIDAK karena di Kawasan rumah sendiri.
3. Kalaulah dianggap mengganggu ketertiban umum maka seharusnya Polisi menangkap pelaku onar yakni Satpam PT Duta Pertiwi Tbk yang menyemprotkan APAR kepada kerumunan warga. Apalagi saat itu ada Kapolsek beserta pasukannya di TKP.
4. Menjadi alat pembenaran (MEMBENARKAN) SURAT KUASA PENGURUS PPPSRS UNTUK MENDHOLIMI WARGA PEMILIK RUSUN GCM. Ibaratnya Karyawannya (Budhi Basharuddin/Pelapor) Pembantu (PT Duta Pertiwi Tbk) yang diberi pekerjaan oleh Pemilik (Warga GCM) malah mendzalimi (mempidanakan) Pemilik (Pemohon I & II) yang merusak kaca untuk menyelamatkan diri pemilik itu sendiri. Pemilik merusak barang sendiri dilaporkan oleh karyawannya pembantu kepada Polisi lalu Polisi menjadikan TERSANGKA. Dan kaca seharga tidak lebih dari Rp.100.000,- itupun sudah diperbaiki dengan uang iuran yang juga ditarik dari warga Rusun GCM juga.

Alasan pembenar Hakim Tunggal untuk menjustifikasi legal standing Pelapor dalam perkara ini (bahwasanya siapapun boleh meaporkan dalam Perkara 170) namun jelas sekali Hakim Tunggal melepas konteks dan memakai TEORI KONSPIRASI PARADOXIAL. Artinya membenarkan yang salah dengan menggunakan klausul yang berbeda namun hasilnya (arahnya) sama yakni untuk mencapai suatu maksud pembenar.

**Kekhilafan 16:** Muncul di Persidangan bahwa andai SURAT KUASA pelapor dianggap SAH mewakili PT Duta Pertiwi Tbk yang mendapat Kuasa dari PPRSC Bonekanya untuk mengkriminalisasi warga pemilik (majikannya yang tidak nurut kepada kepentingan pembantunya/ PT Duta Pertiwi Tbk).

Disisi lain Surat Kuasa yang diberikan oleh Pengurus PPRSC GCM demi hukum tidak boleh digunakan untuk mendholimi warga GCM yang memilih Pengurus, karena Kuasa mutlak tidak boleh melebihi/melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Warga Pemilik Penghuni sebagai pemegang Kedulatan Tertinggi yang memilih dirinya dan apalagi dengan melanggar Hak-hak Keperdataan Pemilik/Penghuni Sarusun, lebih khusus lagi yang sedang diperjuangkan warga Rusun GCM adalah untuk menegakkan UU.

Selaku Pemegang Kuasa dari Pengurus Perhimpunan untuk mengerahkan preman, membuat kekacauan dengan menghalangi warga masuk ke ruangan milik sendiri bahkan sengaja menyemprot gas APAR (Alat Pemadam Api Ringan) ke kerumunan warga guna menciptakan chaos, terror, mengerahkan preman, memadamkan listrik dengan merusak panel milik warga, apalagi untuk melaporkan warga dengan rekayasa kriminalisasi dan menjadikan warga Rusun GCM sebagai tersangka dan dampaknya nyata-nyata telah mengganggu kepentingan, ketentraman, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan serta ketertiban segenap warga Rusun dan pada sebagian juga menggangu keselamatan jiwa (nyawa) dan kesehatan warga Rusun GCM.

Bahwa kontrak yang dibikin antara Pengurus PPRSC GCM versi Pengelola pimpinan Sdr. Agus Iskandar dengan PT. Duta Pertiwi Tbk menyertakan kewenangan pengelola untuk memanfaatkan Hak bersama tanpa mendapat persetujuan dari pemiliknya yang sah yaitu segenap pemilik Sarusun yang mekanismenya diatur dalam Pasal 14 ART PPRSC GCM yang notabene ketentuan tersebut adalah ”bikinan” PT. Duta Pertiwi sendiri. Dan selaku pengelola yang ex pengembang Rusun setidaknya di 9 kawasan yang salah satunya adalah Rusun GCM, dipastikan tahu bahwa Pasal 46 UU 20/2011 mengatur tentang Hak Kepemilikan Sarusun yang dibagi dalam 2 jenis kemilikan yaitu yang bersifat perorangan dan Hak Bersama. **Mustahil** kalau Termohon seolah-olah tidak memahami bahwa kontrak atau perikatan apapun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kekhilafan 17:** Muncul di Persidangan bahwa SURAT KUASA pelapor sudah tidak memiliki ALAS HUKUM sama sekali. Namun dipaksakan sebagai legal standing pelapor.

Dalam persidangan sudah disampaikan bahwa ada Hal yang lebih mendasar lagi dari persoalan SURAT KUASA yang dijadikan sebagai dasar legal standing Pelapor adalah karena Surat Kuasa tersebut CACAT HUKUM, karena saat terjadinya kasus tersebut yaitu 1 Juni 2015, Agus Iskandar dkk tidak lagi mempunyai kapasitas dan legal standing sebagai Pengurus PPRSC GCM, hal ini bukan hanya disebabkan mereka telah diberhentikan dalam RULB dan Pengadilan sendiri telah menjatuhkan Putusan N.O. atas Perkara Nomer: 510/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tapi juga karena masa bhakti kepengurusan mereka sudah berakhir sejak 5 Pebruari 2015, tanpa Putusan N.O. sekalipun sejak 5 Pebruari 2015 mereka otomatis demisioner.

**Kekhilafan 18:** Muncul di Persidangan bahwa POLRES JAKPUS terbukti melayani pesanan PT Duta Pertiwi TbK karena POLRES JAKPUS menggunakan dalil, membenarkan bahwa penunjukan PT. Duta Pertiwi sebagai Pengelola Rusun GCM, didasarkan pada surat Pengurus PPRSC Nomer 21/PPRSC-GCM/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.

Hal yang FATAL kalau hukum dicomot tanpa konteks. POLRES JAKPUS sengaja tidak melihat rangkaian yang mengawali persetujuan (isi surat PPRSC GCM tersebut), yaitu karena kepercayaan penuh Pengurus kepada Dinas yang akan segera melaksanakan RUTA bersama. Sangatlah mustahil, Pengurus PPRSC GCM harus menunjuk Pengelola pengganti PT. Duta Pertiwi yang sudah dipecat warga melalui RULB dan RUTA tahun 2014 hanya untuk kurun waktu 2-3 minggu saja. Maka dalam surat tersebut nyata-nyata dikaitkan dengan kesementaraan, yaitu karena dalam waktu dekat akan diadakan RUTA. Dalam prakteknya RUTA diundur-undur, dan kemudian dibelok kan menjadi RUA, padahal UU No. 20/2011 mengatur bahwa setelah PPPSRS terbentuk tidak dikenal forum RUA.

RUA menurut UU No. 20/2011 adalah forum rapat umum dalam proses awal pembentukan PPPSRS. Dalam AD/ART PPRSC GCM juga hanya mengenal 2 forum rapat umum, yaitu RUTA dan RULB. Belakangan motifasi pengunduran waktu untuk menggelar sebuah RUTA dengan peserta maksimal 750 orang berlarut sampai 6 bulan, bertujuan untuk maksud jahat, yaitu untuk melahirkan KEP GUB yang baru guna menganulir Kep GUB pengesahan PPRSC GCM Nomer: 1029 Tahun 2000, sehingga penggunaan uang IPL, Sinking Fund, Pungutan PPN (10%), Pungutan Jasa Operator (10%), Mark Up Harga Listrik (37-57%), Penggelapan atas Penyewaan Hak Bersama untuk Parkir Komersial, Reklame, BTS/Antene, Kantin, dan Pemalsuan Air serta Pengalihan Hak atas keuntungan Polis Asuransi, Penggelapan atas Pemanfaatan HGB untuk kepentingan Pengelola, dll nya menjadi debatable untuk digugat secara perdata, Bila tetap RUTA maka keabsahan Putusan RUTA cukup dengan Akta Notaris, sehingga Gub DKI tidak bisa menerbitkan KEP Gub yang baru. Sebuah akal-akalan yang harus dihadapi Pengurus dan anggota PPRSC GCM.

**Kekhilafan 19:** Muncul di Persidangan bagaimana LOGIKA GILA Polres Jakpus atas Pesanan PT Duta Pertiwi Tbk, namun demikian Hakim Tunggal memilih untuk ikut sama-sama GILA.

Dalam hal status hukum Pengelola (Pembantunya Warga Pemilik GCM) bertindak sebagai Pelapor dalam Perkara ini, POLRES JAKPUS tidak sepatutnya membenarkan Pelapor berdalih menggunakan surat kuasa yang diberikan oleh Pengurus PPRSC GCM (pimpinan Agus Iskandar). Surat Kuasa yang telah diterbitkan otomatis berakhir manakala yang memberi kuasa tidak lagi mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai Pemberi Kuasa. Maka ketika Pengurus lama tidak mempunyai legal standing dan kapasitas sebagai Pengurus Perhimpunan lagi, sementara kedudukan hukum Pengurus baru menjadi obsolut SAH.

UU Nomer 20/2011 sudah diundangkan, bahwa DEFINISI (MAKNA) PPRS adalah wali amanah warga semestinya untuk menyuarakan dan melindungi kepentingan warga. Kalau kemudian Termohon tetap memaksakan mengakui PPRS Agus Iskandar memberi Surat Kuasa kepada Buddy Basharuddin, artinya Termohon memaksakan pemahaman bahwa warga memberi amanah kepada Agus Iskandar selaku Pengurus PPRS untuk kemudian ia memberi kuasa kepada Buddy Basharuddin (Property Manager PT Duta Pertiwi Tbk) untuk menteror Pemilik Rumah agar berlari menyelamatkan diri dari semprotan asap dari arah KANTOR Buddy Basharuddin, sehingga warga berlarian masuk ke ruangan PPRS dan lantas memecah kaca untuk menyelamatkan diri dan lantas Buddy Basharuddin melaporkan dan menjadikan warga tersangka dengan memperalat Polisi sehingga terjadi banyak kasus TERSANGKA seperti (Saat ini di GCM Johannis Vityn, Liauw Fie Boen), sebelumnya menjadikan TERSANGKA atas pengrusakan gembok milik sendiri GCM (Charly Sianturi, Saurip Kadi), ITC Manggadua (Fifi Tanang, Haida Sutami, Suresh Karnani, Mardiyanta) bahkan memidanakan warga (Kasus Kho Seng Seng ITC Manggadua, Aguswandi Tanjung ITC Roxy Mas, dll).

Artinya Penyidik secara terang-terangan memaksakan menuduh bahwa ratusan warga GCM adalah sudah GILA secara bersama-sama. Bagaimana tidak GILA, kalau ada orang memberi kuasa kepada orang lain untuk mendholimi dirinya sendiri dengan segala cara sebagaimana diuraikan diatas. Mengapa penyidik sengaja menuduh ratusan warga GCM terjangkit wabah gila dengan MEMAKSAKAN LOGIKA PPRS Boneka Duta Pertiwi Tbk dan Buddy Basharuddin (Property Manager PT Duta Pertiwi Tbk yang dikontrak oleh PPRS Boneka tsb) untuk mendzalimi warga selaku pemegang kedaulatan tertinggi dilingkungan Rusun GCM?

**Kekhilafan 20:** SAKSI AHLI dari POLRES JAKPUS (Sdr. Djisman Samoir SH. MH) rupanya SENGAJA dipilih yang “ALERGI MORAL” sebagaimana dikatakan oleh Ybs. di hadapan Hakim Tunggal dalam persidangan bahwasanya “hukum jangan dikait-kaitkan dengan moral”, hal mana sangat amat bertentangan dengan Matakuliah semester 1 Fakultas Hukum berjudul “HUKUM 101 tentang Filsafat Hukum” di seluruh dunia bahwa Sang Pencipta Hukum, John Locke mengatakan “Hukum tanpa Moralitas adalah NERAKA” (“Law without Morality is Hell”). Disini sungguh suatu keajaiban rupanya Hakim Tunggal cukup dapat dimaklumi untuk mengikuti BEKAS DOSEN nya dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini sebagaimana diakui diawal pernyataan perkenalan dengan Saksi Ahli oleh Hakim Tunggal sebagai mantan dosennya, untuk mengikuti aliran HUKUM tanpa MORAL. Sangat cocok dengan PUTUSAN nya yang tidak bermoral tersebut.

1. **NOVUM BARU**

Adanya NOVUM BARU yang ditemukan bahwasanya KACA yang dipecah tersebut esok harinya sudah diperbaiki dengan menggunakan uang warga yang notabene diantaranya adalah PEMOHON I dan PEMOHON II itu sendiri.

Adanya NOVUM BARU bahwa Putusan Pra Peradilan PN Jakarta Selatan Tanggal 01 Maret 2016 No. 01/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL menyatakan bahwa SP3 Bareskrim dinyatakan TIDAK SAH maka PMH (Perbuatan Melawan Hukum) PT Duta Pertiwi Tbk (Christine Natasha Tanjungan dkk) dan Pengurus PPRS Bonekanya (Agus Iskandar Dkk) wajib dilanjutkan karena BUKTI-BUKTI yang terlalu jelas dan komplit. **(Bukti P-72)**

Adanya NOVUM BARU bahwa dalam persidangan PTUN dimana warga GCM mengajukan permohonan Baliknama SHGB dan 27 SHM Fasum Fasos yang masih atas nama PT Duta Pertiwi Tbk, (Ex Pengembang yang sudah menjual secara sempurna namun berkonspirasi dengan OKNUM BPN tidak membaliknamakan yang sudah diserahterimakan kepada P3SRS warga) yang menjadi sumber MALAPETAKA bagi warga PEMILIK seperti yang dialami PEMOHON PK ini, maka terungkap dalam kesaksian bahwa sejumlah Kawasan Rusun telah menang di Pengadilan sehingga SHGB dan Hak Bersama Bagian Bersama milik warga sudah dibaliknamakan kepada P3SRS sebagai wali amanah warga pemilik, bukan lagi atasnama Ex Pengembang, yaitu **Apartemen Oasis Mitra Sarana, Apartemen Slipi, Rumah Susun Taman Hijau Tangerang. (Bukti P-68, P-69 dan P-70)**

Adanya NOVUM BARU bahwa UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 yang berbunyi sbb:

***“*** *(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai*

*ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

*(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

*(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan*

*permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

*(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*

*(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.”*

Dimana dalam pasal tersebut menganut azas FIKTIF POSITIF, artinya apabila surat tidak dijawab berarti DIKABULKAN. Dan sekarang PPRSC GCM sedang surat menyurat dengan Kantor BPN Jakarta Pusat mengenai realisasi baliknama SHGB dan Bagian Bersama GCM kepada atas nama PPRSC GCM. Surat2 dari PPRSC GCM , Jawaban BPN, dan Jawaban Balik dari PPRSC GCM terlampir. **(Bukti P-63, P-80, P-83, dan P-84).**

Adanya NOVUM BARU berupa Surat Jawaban dari Dirjen Pajak cq Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan No. S-634/PJ.04/2016 tanggal 17 Maret 2016 **(Bukti P-76)** yang menjawab Surat PPRSC GCM No. 35/PPRSC-GCM/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016 tentang Permohonan Pengembalian Pajak (Restitusi) karena selama 16 tahun warga Pemilik GCM dikenakan PPN 10% atas Listrik, Air, Service Charge padahal seharusnya tidak kena PPN sebagaimana penjelasan Surat Dirjen Pajak No. S-139/PJ/2013 **(Bukti P-7)**. Hal mana juga merupakan salah satu BUKTI Tindakan PMH PT Duta Pertiwi Tbk dimana PPN yang ditarik dari warga pemilik tidak ada fakturnya dan disalahgunakan untuk penghitungan pajak PT Duta Pertiwi Tbk.

Adanya NOVUM BARU bahwa Tindakan PMH PT Duta Pertiwi Tbk tersebut diatas sangat berpotensi resiko tinggi yang menyangkut nasib para pemilik rusun sebab PT Duta Pertiwi Tbk sebagai Perusahaan Terbuka (Go Public) yang menjual commercial papers sampai di Luar Negeri, berdasar asset-aset Kawasan yang sudah terjual tapi BELUM dibaliknamakan kepada Pembeli (Warga pemilik Kawasan), nanti apabila terjadi gagal bayar (default) atau kepailitan, maka Kurator/Trustee akan menyita kawasan milik kami, yang notabene adalah BUKAN milik PT Duta Pertiwi Tbk. Bisa jadi nasib warga GCM, ITC M2, ITC Roxy Mas dll seperti Bangsa Palestina. Jihad Fisabilillah di GCM, TC M2, dst. Dan untuk itu kami warga GCM sudah melakukan tiga (3) upaya hukum yaitu:

Pertama. Menggugat praperadilan di PN Jakpus ini melawan OJK, Dirjen Pajak, dan BEI untuk melanjutkan penyidikan terhadap praktek-praktek bisnis illegal PT Duta Pertiwi Tbk yang melanggar UU Pasar Modal dan UU Rusun.

Kedua. Karena surat permohonan kepada Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN dan Kepala Kantor BPN Administratif Jakarta Pusat sudah 5 kali tidak ditanggapi, maka PPRSC GCM mendaftarkan Permohonan ke Pengadilan TUN untuk membaliknamakan SHGB dan 27 SHM Bagian Bersama Milik warga GCM.

Ketiga. Warga sudah melaporkan PMH PT Duta Pertiwi Tbk ada sejumlah 32 LP diantaranya soal penipuan dan penggelapan asset bersama milik warga.

Adanya NOVUM BARU Putusan MK No. 21/PUU-XIII/2015 tentang Yudisial Review UU20/2011 Pasal 76 ayat 1 yang menyatakan bahwa masa transisi pengelolaan rusun oleh pengembang sampai serah terima bagian bersama, lahan bersama, barang bersama kepada P3SRS dalam satu tahun (1 tahun) sejak unit pertama terjual (diserah terimakan). Implikasinya LEBIH MENGUATKAN dan MEMASTIKAN bahwa Bagian Bersama MILIK WARGA, TIDAK BOLEH atasnama PENGEMBANG. Dalam hal GCM karena masa transisi PT Duta Pertiwi Tbk yang selesai membangun tahun 1996 dan serah terima sudah dilaksanakan 22 Desember 1999 **(Bukti P-5)** dan Pengesahan Pertelaan GCM SK Gub 1204 Tahun 1997 **(Bukti P-3)** serta SK Gub No. 1029 Tahun 2000 tentang Pembentukan PPRSC GCM **(Bukti P-2).**

Adanya NOVUM BARU berupa Surat Jawaban dari SEKNEG No. B-773/Kemensetneg/D-2/DM.05/02/2016 tanggal 17 Februari 2016 **(Bukti P-85)** atas laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Anil Chandanani yang meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo dengan alasan mau mengembalikan status Warga Negara Indonesia (WNI) karena hak-haknya sebagai pemilik rusun didzalimi oleh Pengembang bahkan memperalat Aparat Pemerintahan. Dan Sdr. Anil Chandanani diajak makan siang oleh Presiden Joko Widodo dan diminta bantuan untuk mengawal solusi rusun yang ada di DKI.

1. **KESIMPULAN**
2. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie dalam Perkara aquo MERUPAKAN SUATU KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DAN FATAL, dengan sangat tendensius memaksakan PENETAPAN TERSANGKA untuk “pidana pasal 170” yang SEMUA UNSUR nya tidak terpenuhi, latar belakang yang terungkap di persidangan juga amat jelas mengandung PENYELUNDUPAN HUKUM bahkan mengandung unsur pesanan MAFIA RUSUN yang berusaha melindungi praktek bisnis ilegalnya melalui rekayasa perkara ini, semua yang terungkap di persidangan bertentangan dengan DAKWAAN, alat bukti yang dipaksakan dan tidak berkualitas, dasar hukum pertimbangan yang tidak solid dan kesaksian saksi kunci yang belepotan, namun Hakim Tunggal VIKTOR PAKPAHAN SH, MH tanpa hati nurani, menutup mata terhadap proses persidangan, memaksakan logika sesat, tidak berani menegakkan keadilan, apapun motifnya.
3. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta alat bukti surat, keterangan ahli dan keterangan saksi di dalam persidangan TERANG BENDERANG tidak terbukti sama sekali bahwa Pemohon I dan II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan yaitu KUHP Pasal 170.

UNSUR PMH SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI

Unsur 170 KUHP tidak terpenuhi, dikarenakan barang bukti yang dirusak adalah milik warga termasuk didalam milik Pemohon I dan II, bukan milik PT Duta Pertiwi Tbk. Unsur BERSAMA-SAMA tidak terpenuhi karena Calon pelaku memecah kaca hanya satu (1) orang sesuai kesaksian Sdr. Helka Raya (Pegawai PT. Duta Pertiwi): “*Kaca itu dipecah oleh Pemohon I dengan menggunakan kursi*”. Apalagi **MOTIF perbuatan pemecahan kaca yang dilakukan Pemohon I sama sekali tidak dapat dihukum karena keadaan memaksa / daya paksa (overmaag), sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP dan pembelaan diri atas ancaman / serangan terhadap diri sendiri / benda milik sendiri / milik bersama (nodweer) sesuai Pasal 49 KUHP. Padahal dalam proses penyelidikan untuk menentukan tindak pidana apa yang terjadi pasti sudah ketahuan overmaag dan nodweer nya**. Kejadian nya BUKAN DENGAN SENGAJA merusak barang, namun ada kejadian yang mendahului yaitu keadaan chaos semprotan asap APAR yang begitu pekat yang membuat sesak nafas. Dalam mediasi sebelumnya memang dilakukan bersama sama sekitar lima puluhan warga yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kemayoran. Bukan terencana secara bersama-sama merusak barang milik sendiri. GILA apa.

1. Bahwa Pasal 170 justru tampak jelas TERLALU DIPAKSAKAN (Pesanan Mafia Rusun) sebab mana ada pemilik barang (PEMOHON PK) merusak barang miliknya sendiri, karena di ruang TKP banyak orang, perbuatan memecah kaca dianggap dilakukan secara bersama-sama, kecuali warga GCM (PEMOHON PK) bersama warga yang lain kena wabah PENYAKIT GILA secara masal, karena Hakim Tunggal VIKTOR PAKPAHAN SH, MH sengaja menghilangkan KONTEKS PERSOALAN (Bukti Kepemilikan, Satpam menyemprotkan APAR, upaya penyelamatan diri, dll) serta TANPA HATI NURANI (menutup mata dan hati) memilih menjadikan pihak PEMILIK barang sebagai TERSANGKA dan dari kesaksian dibawah sumpah nyata-nyata pemecahan kaca oleh Pemohon I dilakukan seorang diri.
2. Bahwa, terbukti secara Yuridis Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan **Nomor** **01/PID.PRAP/2016/PN.JKT.PST, tanggal 02 Februari 2016** TELAH MELAKUKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA serta diperkuat dengan sejumlah NOVUM BARU sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 263.
3. **PENUTUP**

JOHN LOCKE, sang pencipta Trias Politica, mengatakan bahwa “HUKUM tanpa MORAL adalah NERAKA”. Inilah contohnya. Sebab tidak hanya bagaimana CAPITAL VIOLENCE memperalat STATE APPARATUS untuk melakukan STATE TERRORISM dan lantas warga negara yang justru berjuang menegakkan UU20/2011 dan UU Pasar Modal, UU OJK, UU Perpajakan, UU Ketenagalistrikan, dll yang terlibat didalamnya, justru dikriminalisasi (ditangkap, ditahan, dijadikan TERSANGKA, bahkan sampai ada yang diadili selama 6 tahun sampai Kasasi dengan Pasal-pasal karet yang bisa diolor-olor seakan-akan ilmiah padahal INTI kejahatan bukan disitu dan tidak tersentuh), bahkan WAKTU dalam berperkarapun menjadi ALAT untuk menguntungkan pihak Pemesan (Pemberi Job Order) untuk merugikan 1049 warga pemilik penghuni sah yang seharusnya dilindungi UU. Sehingga rakyat hanya bisa berharap kepada Hukum KARMA (HUKUM ALAM/ SUNATULLAH) tetap akan berlaku bagi siapapun.

Selain John Locke, ada Nyi Mutri, seorang ibu dari keluarga petani di Brebes yang tidak pernah pakai celana dalam seumur hidupnya, karena masih pakai kain (kemben) pernah bilang: jangan pernah ragu berjuang untuk kebenaran karena kebenaran bisa membuktikan dirinya (Never stop fighting for the truth as the truth can reveal itself) dalam buku Mengutamakan Rakyat karya Mayjen TNI Saurip Kadi Terbitan Yayasan Obor 2007.

Majelis Hakim disumpah untuk menegakkan keadilan di muka bumi mewakili Tuhan YME untuk memutus perkara dengan azas **keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan**. Ketika ketiga unsur tersebut justru tidak terpenuhi, artinya tidak menghadirkan keadilan (karena justru hukum dipakai untuk merekayasa kasus dan mengkriminalisasi warga tak bersalah), kepastian hukum justru menjadi barang permainan (dengan adanya hal kecil/sepele yang dipanjang-panjangkan), dan azas kemanfaatan amat jelas untuk kepentingan tameng bisnis illegal mafia property (artinya sama dengan kemudaratan untuk ratusan warga yang sedang memperjuangkan hak-hak perdatanya yang diinja-injak oleh mafia property dengan yang sudah terkenal memperalat polisi, mengatur dan mengendalikan hakim, membayar politisi, dll.) maka

Ruang persidangan, walau disajikan dengan bahasa normatif hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, dengan teori-teori dan dalil-dalil yang seakan rumit, namun jangan dikira rakyat awam tidak paham atas sesuatu kelalaian/kekhilafan/kesengajaan/ketidakberanian melawan mafia hukum yang beresiko untuk diri sendiri dan/atau bahkan adanya jual beli perkara untuk kepentingan tertentu (pesanan), sebab mereka memiliki hati nurani keadilan, melalui gelombang energi kejujuran dan dukungan alam semesta yang menjadi mata bathin yang bisa dirasakan, keadilan bukan sekedar pembenaran yang diilmiahkan. (Noam Chomsky).

**Hormat Kami,**

**PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

**Pemohon I Pemohon II**

**Johannis Vityn Liauw Fie Boen**

**Pemohon III**

**PPRSC GCM**

**(Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas)**

**Justiani Hendra Andreas**